

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kategorisasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Berdasarkan Perlengkapan yang Digunakannya

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pedagang kaki lima dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan perlengkapan yang digunakan untuk berjualan seperti pedagang kaki lima yang memakai gerobak, tenda plastik, meja, ataupun perlengkapan lainnya yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima. Berikut beberapa kategori pedagang kaki lima antara lain:

a. Pedagang Kaki Lima yang Memakai Gerobak



Gambar 22. PKL di Jalan Batu Sangkar memanfaatkan gerobak untuk menjajakan barang dagangannya. (Foto by Dodi. 2010)

Pada gambar satu terlihat gerobak yang berisi sayur mayur dan lauk pauk yang siap untuk dijual. Pedagang kaki lima yang seperti ini biasa berjualan menjelang sore hari kira-kira pukul 14.00. Mereka akan pulang jika barang dagangannya habis, walaupun tidak habis maka sisa sayur mayur dan lauk pauk yang ada dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi secara pribadi. Lokasi yang dipilih untuk berjualan yaitu bahu jalan atau dipinggir jalan.



Gambar 23. Gerobak PKL yang berisi aneka kue di Jalan Bukit Tinggi. (Foto by Dodi. 2010)

Pedagang kaki lima yang terlihat dalam gambar dua merupakan pedagang kaki lima yang memakai gerobak untuk menjajakan aneka macam kue. Biasanya pedagang kue semacam ini ramai berjualan menjelang sore hari pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 19.00. pedagang kaki lima yang berjualan kue seperti ini dalam berjualannya bekerja sama dengan para pembuat kue, singkatnya selain membuat sendiri kue untuk dijual, mereka juga ‘menampung’ kue dari para

pembuat kue lainnya untuk dijual kembali. Lokasi yang dipilih untuk berjualan biasanya bahu jalan atau pinggir jalan dan trotoar.



Gambar 24. Tampak gerobak daripada PKL di Jalan Bukit Tinggi yang berisi makanan dan minuman. (Foto by Dodi. 2010)

Umumnya, pedagang kaki lima yang berjualan makanan seperti bakso dan minuman dingin atau es, berjualan dari pagi yaitu pukul 09.00 sampai dengan sore hari pukul 17.00. Mereka memilih trotoar untuk dijadikan sebagai lokasi berjualan.



Gambar 25. PKL di Jalan Bukit Tinggi yang menjual buah-buahan dengan memakai gerobak. (Foto by Dodi. 2010)

Selain makanan dan minuman, ada juga pedagang kaki lima yang berjualan buah-buahan dengan menggunakan gerobak sebagai tempat menjajakan barang dagangannya. Mereka lebih memilih pinggir jalan untuk berjualan. Waktu yang dipilih untuk berjualan yaitu mulai dari pukul 09.00 sampai dengan 17.00.



Gambar 26. Tampak seorang PKL di Jalan Imam Bonjol sedang menunggu barang dagangannya yang berupa kaset *cd*. (Foto by Dodi. 2010)

Selain makanan, minuman, dan buah-buahan, ada pedagang kaki lima yang memakai gerobak tetapi barang yang dijualnya berupa kaset *vcd*. Trotoar dan bahu jalan dipilih sebagai lokasi untuk berjualan. Pedagang *vcd* mulai berjualan dari pukul 09.00 sampai sore hari pukul 17.30.

Dari gambar 22, 23, 24, 25, dan 26 dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima yang menggunakan atau memakai gerobak pada umumnya adalah mereka yang berjualan makanan, minuman, buah-buahan serta kaset *vcd*. Pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak berjualan pada trotoar dan pinggir jalan. Waktu berjualan pun yaitu di mulai pada pagi hari pukul 09.00 sampai dengan sore hari pukul 17.30. Kalaupun ada yang sampai dengan malam hari, mereka hanya sampai dengan pukul 19.00 atau pukul tujuh malam hari.

b. Pedagang Kaki Lima yang Memakai Tenda Plastik



Gambar 27. PKL di Jalan Bukit Tinggi mendirikan tenda plastik sebagai tempat menjajakan barang dagangannya. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 28. Tenda plastik dibuat untuk melindungi barang dagangan PKL di Jalan Imam Bonjol. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 29. Tampak seorang PKL beserta dagangannya yang ada dalam tenda plastik di Jalan Batu Sangkar. (Foto by Dodi. 2010)

Ciri khas yang lain dari pedagang kaki lima adalah mereka memakai tenda plastik. Seperti yang terlihat dalam gambar enam, tujuh dan delapan, tenda plastik digunakan sebagai atap yang bermanfaat untuk melindungi barang dagangan dari panas dan hujan. Pedagang kaki lima yang menggunakan tenda plastik adalah mereka yang menjual barang-barang siap pakai seperti sandal dan sepatu. Tenda plastik yang banyak digunakan adalah yang berukuran kecil seperti yang terlihat dalam gambar 27, 28 dan 29. Tempat yang digunakan untuk berjualan yaitu pinggir jalan dan trotoar. Mereka berjualan dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.30. Barang dagangan dari PKL sewaktu selesai berjualan ada yang dibawa pulang dan ada juga yang dititipkan kepada pemilik toko.



Gambar 30. Tampak tenda-tenda plastik yang buat oleh PKL di Jalan Imam Bonjol. (Foto by Dodi. 2010)

Gambar 30 menunjukkan tenda-tenda plastik yang telah didirikan oleh pedagang kaki lima berada di depan toko. Tenda tersebut di pasang sewaktu pedagang kaki lima memulai aktivitas berjualannya dan dibongkar kembali sewaktu pedagang kaki lima tersebut selesai melakukan aktivitas jual belinya. Biasanya tenda plastik di pasang pada pagi hari sekitar pukul 08.00 dan dibongkar sekitar pukul 19.30 atau bersamaan dengan tutupnya toko-toko yang berada di depan tempat berjualan pedagang kaki lima.

c. Pedagang Kaki Lima yang Berada Di *Emperan Toko*



Gambar 31. Pedagang kaki lima yang menjual buah-buahan di emperan toko di Jalan Batu Sangkar. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 32. PKL yang berada di *emperan* toko di Jalan Batu Sangkar menjual aneka macam dagangan. (Foto by Dodi, 2010)



Gambar 33. Tampak seorang PKL penyedia jasa *service jam* di Jalan Bukit Tinggi. (Foto by Dodi, 2010)

Pedagang kaki lima yang berjualan di *emperan* toko pada umumnya mereka berjualan makanan dan buah-buahan dalam jumlah yang kecil seperti yang terlihat dalam gambar 31 dan 32. Perlengkapan yang dipakai pun seperti meja kecil maupun *bakul*. Namun di sisi lain, pedagang kaki lima yang berada di *emperan* toko adalah para penjual jasa *service* seperti tukang *service* jam dan sol sepatu seperti yang terlihat dalam gambar 33. Untuk penjual makanan dan buah-buahan jika selesai berjualan, perlengkapan yang mereka gunakan seperti meja dan *bakul* disimpan di depan toko.

d. Pedagang Kaki Lima yang Memakai Meja



Gambar 34. Tampak seorang PKL dengan mejanya di Jalan Bukit Tinggi. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 35. Tampak barang dagangan PKL yang diletakan di atas meja. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 36. PKL membuat meja sederhana untuk menjajakan barang dagangannya. (Foto by Dodi. 2010)

Meja yang dipakai oleh pedagang kaki lima berfungsi untuk meletakkan barang-barang dagangannya. Seperti yang terlihat dalam gambar 34, 35 dan 36. Mereka berjualan dari pukul 09.00 sampai dengan sore hari pukul 16.00. Meja yang mereka pakai terkadang dibawa pulang dan terkadang juga diletakan disimpan di sekitar tempat mereka berjualan. Kemudian meja tersebut diikat. Hal ini mereka lakukan agar mempermudah pekerjaan mereka pada keesokan harinya.

e. Pedagang Kaki Lima yang Memakai Gerobak dan Tenda Plastik



Gambar 37. Beberapa PKL penjual makanan dan minuman di Jalan Imam Bonjol yang memakai gerobak mendirikan tenda plastik untuk memberi kenyamanan kepada konsumen. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 38. PKL yang menjual makanan semisal sop kambing dan ayam bakar memerlukan gerobak dan tenda plastik untuk melakukan aktivitasnya. (Foto by Dodi. 2010)

Pedagang kaki lima di kawasan lingkaran cincin Bambu Kuning ada yang menggunakan gerobak dan tenda plastik dalam menjalankan aktivitas usahanya. Gerobak dipakai untuk menyimpan barang-barang dagangannya sedangkan tenda plastik digunakan untuk melindungi mereka, para pembeli dan barang dagangannya dari panas matahari maupun hujan. Pedagang kaki lima yang terlihat dalam gambar 37 berjualan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan sore hari sekitar pukul 17.00. Pedagang kaki lima seperti yang terlihat dalam gambar 38 berjualan mulai dari pukul 15.00 sampai dengan malam hari. Perlengkapan yang mereka gunakan biasa dibawa pulang dan tidak disimpan di tempat mereka berjualan. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran mereka jika disimpan ditakutkan hilang.

f. Pedagang Kaki Lima yang Memakai Meja dan Tenda Plastik



Gambar 39. Tampak PKL yang menjual buah-buahan di Jalan Imam Bonjol menggunakan meja dan tenda plastik. (Foto by Dodi. 2010)

Di kawasan lingkaran cincin Pasar Bambu Kuning ada pedagang kaki lima yang menggunakan meja dan tenda plastik dalam menjalankan usahanya. Meja yang dibuat sederhana kemudian ditambahkan kayu penopang untuk meletakkan tenda plastik yang berfungsi sebagai pelindung dari sengatan matahari dan hujan. Aktivitas yang mereka lakukan dimulai pada pagi hari yaitu pukul 08.00 sampai dengan malam hari pukul 20.00. perlengkapan seperti meja dan tenda plastik biasa disimpan di tempat mereka berjualan. Bahkan untuk barang-barang yang mereka jual pun biasa disimpan di tempat mereka berjualan. Petugas keamanan dan preman pasar akan menjaga barang-barang mereka. Mereka hanya membayar sekitar 10 ribu rupiah untuk uang keamanan.

2. Kategorisasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Sifatnya

Kategorisasi pedagang kaki lima berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pedagang kaki lima tetap serta pedagang kaki lima musiman. Pedagang kaki lima tetap adalah mereka yang tetap berjualan dalam keadaan apapun tanpa mengenal musim dan bulan-bulan yang diistimewakan seperti bulan Ramadhan. Sedangkan pedagang kaki lima musiman muncul di saat waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan dan menjelang pergantian tahun masehi. Perbedaan antara pedagang kaki lima tetap dan pedagang kaki lima musiman dapat dilihat melalui jenis barang yang dijualnya. Untuk memudahkan berikut disajikan beberapa gambar pedagang kaki lima tetap dan pedagang kaki lima musiman.

a. Pedagang Kaki Lima Musiman

Pedagang kaki lima musiman adalah para pedagang yang berjualan pada waktu-waktu tertentu seperti Bulan Ramadhan atau menjelang Idul Fitri dan saat pergantian tahun baru masehi. Pedagang kaki lima musiman biasa berjualan pakaian, aneka kue untuk Idul Fitri, berbagai macam pernak-pernik Idul Fitri, serta kembang api dan petasan yang biasanya ramai dijual saat Bulan Ramadhan dan menjelang pergantian tahun baru Masehi.



Gambar 40. Tampak Aneka kue yang dijajakan oleh PKL di Bulan Ramadhan. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 41. Menjelang Idul Fitri pernak-pernik seperti taplak meja banyak dijual oleh PKL di Jalan Bukit Tinggi. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 42. Tenda dengan ukuran besar disediakan oleh PKL musiman di Jalan Imam Bonjol. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 43. Aneka toples atau tempat menyimpan kue serta tempat menyimpan air minum gelas plastik banyak dijual oleh PKL musiman. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 44. Kembang api dan petasan ramai dijual oleh PKL musiman saat Bulan Ramadhan dan menjelang pergantian tahun baru Masehi. (Foto by Dodi. 2010)

Gambar 40, 41, 42, 43, dan 44 menunjukkan bahwa pedagang kaki lima musiman mulai dari yang menjual kue, pernak-pernik aksesoris untuk Idul Fitri, pakaian serta kembang api dan petasan banyak bermunculan saat Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Pedagang kembang api dan petasan akan ramai berdagang lagi pada saat menjelang pergantian tahun baru masehi. Bahu jalan atau pinggir jalan dan trotoar menjadi lokasi tempat mereka berjualan. Pedagang musiman memang menimbulkan sejumlah masalah seperti kemacetan lalu lintas.

b. Pedagang Kaki Lima Tetap

Pedagang kaki lima yang sifatnya tetap akan terus berjualan tanpa melihat musim-musim tertentu seperti Bulan Ramadhan, pergantian tahun baru masehi. Namun pedagang kaki lima tetap akan dipengaruhi oleh ketersediaan modal serta ancaman penertiban dan pengguusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Jika modal masih tersedia maka mereka akan tetap berjualan. Mereka akan berhenti berjualan jika modal sudah tidak tersedia dan jika mereka terkena pengguusuran dan penertiban yang barang dagangannya disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Contoh dari pedagang kaki lima tetap yaitu mereka yang berjualan makanan dan minuman dengan menggunakan gerobak, pedagang kaset *vcd*, pedagang sandal dan sepatu, pedagang aksesoris, serta pedagang buah-bauahan. Seperti yang terlihat dalam gambar 45, 46, 47, 48, 49, dan 50. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh dari pedagang kaki lima tetap yang berada di kawasan lingkaran cincin Pasar Bambu Kuning.



Gambar 45. Pedagang kaki lima yang menjual makanan seperti terlihat dalam gambar tetap berjalan selama modal masih tersedia. (Foto by Dodi, 2010)



Gambar 46. Pedagang kaki lima yang menjual kaset *vcd*. (Foto by Dodi, 2010)



Gambar 47. Pedagang kaki lima yang menjual sandal dan baju. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 48. Tampak seorang pedagang aksesoris yang sedang menunggu barang dagangannya. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 49. Pedagang minuman dingin berjualan tanpa mengenal musim. (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 50. Tampak penjual buah-buahan sedang menunggu barang dagangannya. (Foto by Dodi. 2010)

B. Perlawanan Di Simpang Jalan

1. Tentang Mereka; Aldi, Hasan, Eka, dan Agus

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah bunyi Pancasila sila ke lima yang senantiasa dibacakan sewaktu upacara pengibaran bendera setiap hari Senin. Mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA selalu dibacakan tanpa pengecualian. Tentu saja harapannya sila tersebut dapat dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Substansi dari sila tersebut yaitu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap bidang kehidupan tanpa pengecualian.

Namun *pasca* orde baru yaitu era reformasi sekarang ini, keadilan justru semakin sulit didapatkan. Pemilihan kepala daerah secara langsung yang diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan malah terjebak dalam konflik politik yang berbuntut pada memburuknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung akhirnya hanya menghasilkan raja-raja kecil yang berlaku sewenang-wenang. Akhirnya penguasaan dominan pemerintah hanya melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak *pro* rakyat.

Penindasan, penghisapan, dan peminggiran kaum yang lemah baik secara ekonomi maupun politik semakin nyata terjadi. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, hegemoni atau penguasaan dominan terhadap suatu kelompok dapat disaksikan secara jelas. Penertiban dan penggusuran terhadap Pedagang Kaki

Lima (PKL) Di kawasan Pasar Bambu Kuning dan pasar-pasar lainnya di Kota Bandar Lampung menjadi suatu bukti akan penguasaan dominan penguasa yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun ketika penguasaan dominan tersebut semakin kuat dilakukan oleh penguasa, maka apakah akan ada orang-orang yang berusaha melakukan *counter* hegemoni atau perlawanan tandingan? Dalam konteks masalah penertiban dan pengusuran di kawasan Pasar Bambu Kuning jawabannya tentu ada, namun siapakah mereka? Berikut ini uraian singkat mengenai orang-orang yang tetap melakukan *counter* hegemoni terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam masalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Turaihan Aldi (41), biasa disapa oleh teman-teman pedagang kaki lima dengan panggilan Kang Aldi. Keseharian Aldi selain aktif melakukan pengorganisasian pedagang kaki lima, Aldi juga aktif pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Advokasi Anak (LAdA) ringkasnya Aldi merupakan pekerja sosial. Mulai dari tahun 2000 Aldi telah aktif dan konsisten melakukan pengorganisasian pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung termasuk di kawasan Pasar Bambu Kuning. Aldi juga merupakan salah satu tokoh yang ikut serta mendirikan Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Tanjung Karang pada tahun 2000 yang saat ini berganti nama menjadi Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Bandar Lampung.

Hasan Basri (29), merupakan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Bambu Kuning yaitu di Jalan Bukit Tinggi. Enam tahun Hasan menjadi pedagang kaki lima dengan tempat berjualan yang tidak menentu. Sebelumnya Hasan menjadi pedagang kaki lima di Jalan Pangkal Pinang atau yang lebih di kenal

dengan sebutan Pasar Tengah. Bermodalkan terpal plastik, Hasan membuka *lapak* untuk menjajakan taplak meja dan kembang api. Bayang-bayang penertiban dan pengusuran membuat Hasan aktif di organisasi Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Bandar Lampung menjadi pilihan Hasan untuk berjuang bersama pedagang kaki lima lainnya.

Bercita-bercita untuk menjadi seorang pengusaha adalah impian dai seorang Eka Nofrika (27) pedagang kaki lima yang berjualan di depan pagar Gereja Pasar Bambu Kuning. Telah lima tahun Eka menjadi pedagang kaki lima yang selama itu pula Eka berpindah-pindah tempat untuk berjualan. Saat ini Eka lebih memilih menjual kembang api dan petasan. Keterbatasan keuangan membuat Eka tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjual kembang api dan petasan. Ancaman penertiban dan pengusuran dari Satuan Polisi Pamong Praja atau bahkan jika sedang sial tertangkap oleh polisi karena menjual petasan, rasanya membuat Eka ikut bergabung dalam organisasi Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Bandar Lampung.

Menjadi pedagang kaki lima bukanlah sesuatu yang menjadi cita-cita dari seorang Agus Siregar (36). Selama 10 tahun pula Agus merasakan teror penertiban dan pengusuran. Terkadang ia harus beradu otot dengan Polisi Pamong Praja untuk sekedar mempertahankan *lapak* dan barang dagangannya. Heroik dan membuat hati miris melihat kisah Agus yang mencari penghidupan yang layak, mencari kesejahteraan ekonominya dengan berprofesi sebagai seorang pedagang. Heroik karena ketika negara tidak mampu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu amanat untuk mensejahterakan rakyat justru rakyat sendirilah yang

susah payah mensejahterakan dirinya sendiri. Membuat hati miris karena pedagang kaki lima memakai fasilitas publik seperti trotoar, bahu jalan, emperan toko untuk menjalankan usahanya.

Saat ini Agus menjadi pedagang kaki lima di Pasar Tengah dengan *lapak* yang dipenuhi oleh pakaian anak-anak dan dewasa sebagai barang dagangannya. Sebelumnya Agus adalah pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning. Namun penggusuran besar-besaran di Oktober 2007 membuat Agus berpindah tempat ke Pasar Tengah. Agus merupakan ketua dari organisasi Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Bandar Lampung.

2. Konflik dan Perlawanan

a. Namanya Juga Mencari Nafkah !

“Sebuah akhir yang tak selesai”, demikianlah barangkali kalau kita meminjam frase Ayu Utami (Santoso, 2004) untuk melukiskan pertempuran yang terjadi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung khususnya di kawasan lingkai cincin Pasar Bambu Kuning. Beragam perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dianggap merugikan bahkan mengancam keberadaannya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kurun waktu 10 tahun ini. Seperti yang telah diuraikan dalam bab IV bahwa Pasar Bambu Kuning merupakan magnet bagi para pengusaha baik yang bermodal besar

maupun pengusaha yang modalnya terbatas atau kecil, pengusaha dengan bermodal di bawah 10 juta.

Keterbatasan modal tidak membuat PKL kehabisan ide, ketidakmungkinan menyewa kios atau toko yang harga sewa per bulan mencapai puluhan juta rupiah, PKL memilih untuk memanfaatkan fasilitas publik seperti bahu jalan, trotoar, dan emperan toko untuk dijadikan tempat usahanya. Dengan tambahan gerobak dan tenda plastik, PKL dapat membuka *lapak* pada tempat yang telah menjadi pilihannya tentunya dengan tambahan syarat-syarat lainnya seperti menyewa tempat pada preman pasar.

Menurut Agus (36 tahun, Ketua PPKL), berjualan pada fasilitas publik seperti bahu jalan atau di pinggir jalan, trotoar, dan emperan toko memang menjadi pilihan bagi pedagang-pedagang yang modalnya kecil ditambah dengan gerobak dan tenda sebagai pelengkap kegiatan usahanya.

“PKL itukan sebenarnya sejak jaman dulu sudah ada yaitu waktu zaman VOC. Yang dikatakan PKL yaitu mereka yang berdagang dipinggir jalan dan umumnya mereka berjualan di fasilitas publik seperti pasar, terminal, dan stasiun. Dan mereka itu pake gerobak sama tenda plastik”. (Agus, 36 tahun, 25 Juli 2010)

Minimnya lapangan kerja yang tersedia serta adanya tuntutan ekonomi keluarga menjadikan profesi PKL sebagai pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apalagi jika program-program kerja yang ditawarkan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah lebih bersifat instan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum menyentuh sektor-sektor

informal diperkotaan seperti tidak adanya bantuan modal untuk Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Ya itu kan namanya mencari nafkah untuk hidup, untuk makan, untuk nafkahkan anak dan istri, mau digimanain lagi. Ya kalau mau nyewa toko ga mungkin kan butuh modal yang gede, makanya dagang-dagang dipinggir jalan itu”. (Hasan, 29 tahun, 10 Juli 2010)

“Ya wajar-wajar saja dagang di tempat-tempat itu, namanya juga mencari nafkah. Dan bagi saya itu tidak melanggar kecuali kalau di jalan”. (Eka, 27 tahun, 15 Juli 2010)

b. Strategi Perlawanan Pedagang Kaki Lima

Menurut Aldi (41 tahun, pekerja sosial), PKL sebenarnya menyadari dan memahami jika mereka melakukan usaha pada fasilitas publik adalah sesuatu yang melanggar aturan. Tetapi sebagai warga negara mereka pun berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan tugas negara adalah memberikan hak tersebut. Adanya penggusuran dan penertiban menandakan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memberikan solusi yang tepat. Seharusnya pemerintah kota memberikan tempat bagi PKL sehingga mereka tetap bisa berjualan dan sebagai warga negara hak-haknya pun juga terpenuhi.

“PKL sadar kalo berjualan di trotoar dan pinggir jalan atau depan toko itu melanggar dan mereka tahu. Tapi kan mereka juga sebagai warga negara kan punya hak yang sama di dalam mencari penghidupan yang layak. Artinya ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang melarang PKL mestinya kan harus diberikan tempat, di mana tempat pedagang kaki lima bisa berjualan sehingga hak-haknya juga terjamin. Ini dikeluarkan Perda No 8 Tahun 2000 tapi juga ga ada diperda itu satu pasalpun yang menempatkan PKL untuk berjualan ditempat yang strategis”. (Aldi, 41 tahun, 25 Juni 2010)

Penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selalu didahului oleh munculnya surat pemberitahuan larangan berdagang dan ancaman penertiban yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada pedagang kaki lima di kawasan lingkaran cincin Pasar Bambu Kuning. Menurut pedagang kaki lima surat pemberitahuan hanya sampai tiga kali, jika pedagang kaki lima masih berjualan setelah surat pemberitahuan yang ketiga keluar maka Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pasar Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban. Dalam surat pemberitahuan ada tanggal atau waktu dilaksanakannya penertiban. Bagi pedagang yang nekat berjualan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka saat penertiban dan penggusuran biasanya *lapak* nya digusur serta barang dagangannya akan disita oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Ada sebagian pedagang yang kadang kala harus bentrok fisik, hal ini dilakukan untuk mempertahankan *lapak* dan barang dagangannya.

“Biasanya kan kalo mau ditertibin ada surat pemberitahuan yang isinya ya larangan berjualan, kalo yang ngikutin surat pemberitahuan khususnya yang ketiga itu, PKL-PKL pada ga jualan, kalo masih jualan ya ditertibin itu resikonya.. Nah kalo PKL yang nekat jualan bisa berantem sama satpol pp karena dagangan PKL pasti diangkut. Kalo udah diangkut kalo mau ngambil itu barang dagangan ya harus ke kantor satpol pp. Kalo barang dagangan masih ada syukur kalo aga ada ya mau gimana lagi” (Hasan, 29 Tahun, 06 September 2010)

Bagi pedagang kaki lima yang barang dagangannya disita maka mereka dapat mengambil barang dagangannya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja namun beruntung bagi mereka yang masih mendapatkan barang dagangannya. Bagi mereka yang barang dagangnya tidak ada maka sudah pasti mereka harus ‘gigit jari’. Jika hal ini terjadi maka pedagang kaki lima tersebut harus segera mencari modal pinjaman, jika modal sudah tersedia maka mereka akan kembali berjualan di tempat yang sama. Tetapi ada beberapa pedagang kaki lima yang biasanya pindah tempat seperti biasa berjualan di Jalan Bukit Tinggi terus pindah berjualan di Jalan Imam Bonjol atau jalan-jalan lainnya yang letaknya ramai dilewati konsumen. Tetapi ada juga pedagang kaki lima yang pindah berjualan yang tadinya dari ada di sekitaran Pasar Bambu Kuning maka saat ini mereka berjualan di Pasar Tengah atau Jalan Pangkal Pinang.

“Setelah pengusuran PKL yang dagangannya disita, ya harus nyari modal lagi. Kalo masih mau jualan. Biasanya ya seminggu itu nyari modal. Kalo udah gitu kita nyari lokasi baru untuk tempat jualan. Bukan ditempat awal kita jualan. Kalo biasa jualan di Jalan Bukit Tinggi kita pindah ke Depan Bambu Kuning atau pindah ke tempat lain kaya Pasar Tengah”. (Hasan, 29 Tahun, 06 September 2010)

Di lain pihak, mereka yang mengindahkan atau mengikuti surat pemberitahuan tentang penertiban dan pengusuran maka pada hari yang telah ditentukan atau sesuai dengan hari penertiban, biasanya mereka tidak berjualan. Mereka akan ‘menghilang dan kabur’ dari tempat mereka biasa berjualan. Mereka menunggu satu sampai tiga hari setelah penertiban dan pengusuran maka mereka akan melanjutkan berjualan lagi.

“Bagi PKL yang ngikutin surat pemberitahuan itu ya mereka waktu hari ada penertiban ya ga jualan. Jualan lagi satu tiga hari kemudian. Daripada digusur lebih baik ga jualan”. (Eka, 27 tahun, 06 September 2010)

Adalah terlalu naif ketika kita berbicara mengenai aturan tetapi aturan tersebut justru menimbulkan masalah baru. Naif ketika kita berbicara mengenai peraturan tetapi kita pun menerabas batas yang seharusnya tidak kita lewati. Permasalahan PKL, serta ketidaksensitifan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyikapi masalah tersebut seakan menimbulkan asumsi bahwa konflik kedua pihak ini akan terus-menerus terjadi tanpa ada ujungnya.

Pengambil alihan lahan atau tempat seperti trotoar, bahu jalan atau pinggir jalan,, serta emperan toko yang seharusnya menjadi fasilitas publik oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Bambu Kuning (Jalan Bukit Tinggi, Jalan Batu Sangkar, dan Jalan Imam Bonjol) dapat dimaknai bahwa kekuasaan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan segenap perangkat kerja dan berbagai aturan justru terkalahkan oleh pedagang kaki lima.

Inilah oposisi simbolis *ala* Pedagang Kaki Lima (PKL), inilah gerakan laten yang muncul dari aktivitas Pedagang Kaki Lima setiap harinya. Jika ada pengusuran dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) akan melakukan perlawanan walaupun akhirnya kalah, *lapak* maupun gerobak berserta barang dagangannya akan diangkut oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tetapi di balik kekalahan itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) keesokan harinya tetap berjualan di lokasi yang berbeda. Berpindah-pindah, "*main kucing-kucingan*" dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja nampaknya akan terus dilakukan sebelum permintaan akan

tempat yang layak dan representatif diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung secara ikhlas dan sukarela tanpa ada *embel-embel*. Jenis perlawanan seperti yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Bambu Kuning begitu lentur, dan tidak menampakan kekakuan. Aksi mereka tidak saja memusingkan para petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Peraturan Daerah itu sangat Merugikan PKL !

Kita dapat menarik garis waktu lebih ke belakang, protes dan perlawanan PKL terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya PKL di kawasan Pasar Bambu Kuning tidak hanya terjadi di era kepemimpinan Walikota Edy Soetrisno tapi di era sebelumnya pun perlawanan dan protes itu terjadi. Tahun 2000 menjadi awal konflik Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PKL. Lahirnya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000 yang mengatur tentang ketertiban, keindahan dan kenyamanan kota diimplementasikan dalam bentuk penertiban dan pengusuran terhadap PKL yang dianggap sebagai sumber munculnya kemacetan, ketidaknyamanan dan ketidakindahan kota.

“Sebenarnya Perda tersebut tidak tepat jika diterapkan atau dijadikan suatu alasan untuk menertibkan dan mengusur PKL. Perda tersebut jika dicermati yaitu mengenai ketertiban, keindahan dan kenyamanan kota, kami PKL tidak mau dijadikan kambing hitam adanya kesemerawutan. Sebenarnya ada perda yang mengatur tentang PKL yaitu perda nomor sekian saya lupa itu. Tetapi dalam implementasinya pemkot hanya mengacu kepada perda No 8 tahun 2000 yang justru tidak tepat. Kami sebenarnya berharap bahwa dalam pembuatan perda yang berkaitan dengan PKL kami dilibatkan, tetapi kami sama sekali tidak dilibatkan. Tidak ada niatan baik dari pemkot kepada PKL”. (Agus, 36 tahun, 25 Juli 2010)

Menurut Aldi (41 tahun, pekerja sosial) Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000 hanya menerangkan tentang ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kota. Jika perda tersebut diterapkan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), berarti Pedagang Kaki Lima dianggap pihak yang telah mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan kota. Hal ini tentu sangat merugikan pedagang Kaki Lima (PKL) karena jika Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan perda yang melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan pada fasilitas publik maka Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menyediakan tempat khusus bagi Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning.

“perda no 8 itu perda yang melarang PKL berdagang di badan-badan jalan. Jadi perda itu, mestinya melihat juga kondisinya, itu ada ga tempat. Kalau misalnya ada satu larangan perda berartikan mereka ada tempat yang sebetulnya untuk PKL, sehingga dikeluarkan perda larangan sehingga PKL dilarang berdagang di tempat-tempat yang telah disediakan kan mestinya gitu. Perda itu sangat merugikan PKL”. (Aldi, 41 tahun, 25 Juni 2010)

Sebuah kebiasaan yang sebenarnya hanya menjadi formalitas dan normatif yaitu jika hendak dilakukan penertiban dan pengusuran terhadap Pedagang Kaki Lima di kawasan lingkaran cincin Pasar Bambu Kuning, Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu memberikan surat teguran. Padahal cara-cara seperti ini tidak diharapkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka berharap jika Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Bambu Kuning untuk berunding atau negosiasi sehingga ada kesepakatan yang mengikat. Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Waktu negosiasi justru terjadi sesudah penertiban dan pengusuran terjadi, atau negosiasi terjadi ketika Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Pasar

Bambu Kuning melakukan aksi demonstrasi mendatangi kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Saya melihatnya bahwa Pemkot ini kurang mendengar daripada aspirasi PKL. Kenapa saya katakan demikian, karena seharusnya jika ingin menata Kota Bandar Lampung tetapi kita juga harus memperhatikan daripada kelanjutan nasib PKL. Pemkot harus menyediakan tempat yang layak dan representatif dengan PKL. Pemkot tidak bisa hanya menggusur begitu saja, jika itu terus dilakukan maka angka pengangguran dan angka kemiskinan di kota ini semakin bertambah. Selain itu, kami PKL sebenarnya berharap ketika ada penataan maka PKL itu dilibatkan karena kami ini adalah korban dari kebijakan Pemkot. Selama ini yang dilakukan pemkot ketika mau menggusur, di sini saya katakan menggusur karena selama ini pemkot tidak menata tapi menggusur. Kalau mau menggusur PKL, pemkot hanya memberikan surat teguran satu, dua sampai dengan tiga. Padahal yang diinginkan PKL bukan seperti itu, hal tersebut bukan suatu solusi. PKL selalu berharap bahwa pemkot memberikan tempat untuk PKL, dan tempat yang disediakan tentunya tidak mengurangi omset PKL”. (Agus, 36 tahun, 25 Juli 2010)

Sebuah aturan yaitu Perda No 8 Tahun 2000 dimaknai oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sesuatu yang sangat merugikan dan menunjukkan ketidakberpihakannya kepada kaum yang lemah seperti PKL. Menurut Hasan (31 tahun, PKL di Jalan Bukit Tinggi), sebuah perda haruslah berpihak kepada masyarakat khususnya PKL.

“Kalau bisa perda itu harus perda yang berpihak kepada PKL”.
(Hasan, 29 tahun, 10 Juli 2010)

d. Usulan PKL Tidak Diterima oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung

Bambu Kuning Square (BKS) seakan menjadi solusi terakhir dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyelesaikan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung khususnya PKL yang berada di kawasan Pasar Bambu Kuning. Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) dalam pengerjaan BKS.

“APPSI akan Bangun Bambu Kuning Square; Pemkot Bandar Lampung akan membentuk tim penataan pedagang kaki lima (PKL). Hal itu terkait rencana Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) membangun Pasar Wisata Bambu Kuning Square di lahan milik PT Kereta Api (KA), Jalan Kotaraja. (Lampung Post, Kamis, 8 Mei 2008)



Gambar 51. Bambu Kuning Square sedang dalam proses pembangunan. (Foto by Dodi. 2010)

Namun betulkah pembangunan Bambu Kuning Square (BKS) sepenuhnya diamini oleh PKL. Di sisi lain, Pasar Bambu Kuning pun sedang mengerjakan proyek Bambu Kuning Trade Center (BTC). Walaupun BKS dan BTC merupakan

sesuatu yang berbeda, BKS disiapkan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), sedangkan BTC merupakan proyek perbaikan Pasar Bambu Kuning dengan kata lain BTC adalah proyek rehabilitasi pasar dengan tujuan untuk menjadikan Bambu Kuning menjadi indah dilihat.



Gambar 52. Lokasi BKS dibangun di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia. (Foto by Dodi. 2010)

Pandangan lain diberikan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menanggapi pembangunan BKS dan BTC. Menurut Agus (36 tahun, pedagang kaki lima dan Ketua PPKL), adanya penolakkan dalam pembangunan BKS karena hasil dari pembangunan BKS tidak diperuntukan bagi PKL tetapi diperuntukan bagi para pedagang yang sanggup membeli kios maupun menyewa kios dengan ukuran 3x3 meter, jika membeli kios harganya mencapai 200 juta rupiah sedangkan untuk menyewa dapat mencapai puluhan juta rupiah. Menurutnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki modal yang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menyewa kios apalagi untuk membelinya. Alasan lainnya yaitu, omset pedagang yang dikhawatirkan turun karena belajar dari pengalaman para pedagang Pasar Bambu Kuning yang tadinya dari lantai satu kemudian dipindahkan ke lantai dua, setelah dipindahkan justru omset penjualannya menurun drastis bahkan ada pedagang yang bangkrut.

“PKL dari awal dibangunnya Bambu Kuning Square (BKS) menolak keberadaan BKS. PKL menolak karena BKS bukan diperuntukan untuk PKL. Di situ ada lantai satu, dua dan tiga. Lantai satu dan dua itu diperuntukan untuk kios yang harganya mencapai 200 juta rupiah dengan ukuran 3x3 m. Kalau kita berbicara BKS sama saja kita akan mengulangi hal yang sama yang pernah terjadi di Pasar Bambu Kuning di mana pedagang yang Bambu Kuning yang berada di lantai dua itu mengalami penurunan omset yang drastis bahkan ada yang gulung tikar. Saya kira semua ini sangat bertentangan dengan yang selama ini diinginkan PKL. Kita harus melihat dengan jelas bahwa PKL itu modalnya terbatas, modalnya hanya berada dikisaran 5 juta ke bawah. Kalau PKL dipindahkan ke BKS maka yang terjadi yaitu PKL akan semakin terpuruk kehidupan ekonominya. Jika PKL disuruh beli toko maka tidak akan mampu jika harganya tinggi seperti itu”. (Agus, 36 tahun, 25 Juli 2010)



Gambar 53. Area pembangunan BKS ditutup dan terlarang untuk umum. (Foto by Dodi. 2010)

Masih menurut Agus, di balik penolakan terhadap pembangunan BKS, sebenarnya PKL menawarkan sebuah konsep untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Bandar Lampung khususnya PKL yang berada di kawasan Pasar Bambu Kuning. Konsep tersebut yaitu Pasar Rakyat, pengerjaan konsep tersebut dilakukan oleh PKL beserta dengan salah satu dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung. Untuk lahan Pasar Rakyat, Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Bambu Kuning yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Bandar Lampung menawarkan konsep tersebut kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung namun konsep tersebut tidak diterima alias ditolak. Dalam konsep yang ditawarkan PKL, lantai satu dan dua yang saat ini di bangun BKS tidak perlu dibangun kios tetapi cukup dibangun *lapak*. Menurutnya, dengan dibangun *lapak* maka tempat tersebut mampu menampung 1500 PKL.

“PKL sebenarnya pernah membuat suatu konsep yang bekerjasama dengan fakultas teknik Unila yaitu mengenai konsep pasar rakyat di Kota Bandar Lampung. PKL yang tergabung dalam organisasi

Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Kota Bandar Lampung pernah meminta lahan PT KA yang saat ini dibangun BKS. Namun usulan PKL tidak diterima oleh pemkot. Seandainya konsep mengenai pasar rakyat diterima oleh pemkot maka persoalan PKL akan selesai. Khususnya persoalan PKL di sekitaran Pasar Bambu Kuning. Mengenai konsep pembangunan pasar rakyat, lantai satu dan lantai dua yang kami usulkan itu tidak perlu ada kios tetapi kami hanya mengusulkan untuk dibangun lapak. Lantai satu dan lantai dua di BKS jika dibangun lapak maka akan mampu menampung sekitar 1500 PKL. Selain itu, kami pun menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membangun pasar rakyat yaitu sekitar 20 milyar. Anggaran tersebut kami mengusulkan dari APBD pemkot. Jika tidak bisa dibuat dalam satu tahap maka bisa dibuat dalam dua tahap”. (Agus, 36 tahun, 25 Juli 2010)

Sekali lagi Agus menyayangkan sikap dari Pemerintah Kota Bandar Lampung yang justru memberikan pengerjaan BKS kepada pihak pengembang yang menurutnya jika pembangunan BKS diberikan kepada pengembang maka konsep yang ditawarkan semakin memarjinalkan PKL karena penuh dengan perhitungan komersil.

“Tetapi dalam kenyataannya pembangunan BKS justru direkomendasikan kepada pihak pengembang dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Maka dari itu, kami pihak PKL ketika melihat konsep yang ditawarkan oleh pengembang dan APPSI jelas penuh dengan kepentingan bisnis komersil serta semakin tidak berpihak kepada PKL. Maka itu kami PKL menolak pembangunan BKS”. (Agus, 36 tahun, 25 Juli 2010)

Sikap penolakan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga ditunjukkan terhadap pembangunan BTC yang dianggap semakin membuat PKL susah. Menurut Hasan (31 tahun, pedagang kaki lima di jalan Bukit Tinggi), pembangunan BTC semakin mempersempit ruang gerak PKL. Selain itu, tempat parkir yang disediakan untuk pengunjung semakin sulit ditemui.

“Sebenarnya ga setuju buat pembangunan BKS itu, lahan tambah sempit, tempat parkir juga ga ada”. (Hasan, 29 tahun, 10 Juli 2010)

Pada dasarnya pedagang kaki lima meminta tempat yang layak dengan harga yang terjangkau. Selain itu pengelolaan tempat tersebut diberikan kepada pedagang kaki lima yang dapat bekerja sama dengan dinas pasar. Permasalahan pedagang kaki lima dapat selesai jika melibatkan pedagang kaki lima itu sendiri.



Gambar 54. Pasar Bambu Kuning yang sedang dibangun Bambu Kuning Trade Center (BTC). (Foto by Dodi, 2010)



Gambar 55. Salah satu bagian Pasar Bambu Kuning yang sedang dibangun Bamboo Kuning Trade Center (BTC). (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 56. Bagian belakang Pasar Bambu Kuning yang sedang dibangun Bamboo Kuning Trade Center (BTC). (Foto by Dodi. 2010)



Gambar 57. Pembangunan Bambu Kuning Trade Center (BTC) bagian sebelah kiri Pasar Bambu Kuning tepatnya di Jalan Batu Sangkar, (Foto by Dodi. 2010)

3. Aksi Terbuka

a. Catatan 10 Mei 2010; Demonstrasi dan Negosiasi

“negosiasi di kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung”. (Bandar Lampung, 10 Mei 2010)

Lama rasanya aku menunggu saat-saat di mana Pedagang Kaki Lima atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKL melakukan aksi mobilisasi massa atau demonstrasi. Setelah sekian bulan menunggu, kesempatan itu akhirnya datang juga. Aku mendengar kabar bahwa Senin 10 Mei 2010 menjadi momen istimewa bagi aku karena di hari dan tanggal tersebut PKL yang berada di kawasan Pasar Bambu Kuning, Pasar Gintung, dan Pasar Tengah sepakat melakukan aksi demonstrasi. Kabar itu aku dengar sewaktu melakukan aksi peringatan buruh atau *May Day*. PKL yang tergabung PPKL (Persatuan Pedagang Kaki Lima) Bandar

Lampung akan membawa isu-isu seputar penertiban, penggusuran, penolakan terhadap pembangunan Bambu Kuning Square (BKS) dan Bambu Kuning Trade Center (BTC), serta meminta diberikan *lapak* dagangan yang layak dan refresentatif.

Sebelum melakukan aksi demonstrasi, Tanggal 8 Mei 2010 pukul 20.00 WIB bertempat di sekretariat PPKL Bandar Lampung Jalan Raden Fatah Gang Bukit II No 15 Kaliawi Bandar Lampung, PPKL melakukan rapat persiapan demonstrasi 10 Mei 2010. Dalam rapat dibahas mengenai latar belakang mengapa mereka (PKL) harus melakukan demonstrasi, lalu isu-isu yang akan dibawa sewaktu aksi, perlengkapan yang dibutuhkan untuk aksi, rute aksi, serta penunjukan koordinator umum yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam aksi tersebut dan koordinator lapangan yang bertanggung jawab saat aksi dilakukan.

Sabtu malam telah tiba, rapatpun di mulai pada pukul 20.10, ya lebih sepuluh menit dari jadwal yang telah ditentukan. Peserta rapat berjumlah 30 orang. Dalam rapat yang berlangsung selama lebih kurang 90 menit, tercapai sebuah kesepakatan bahwa aksi akan dilaksanakan pada Senin 10 Mei 2010 di mulai pada pukul 08.00 sampai dengan selesai, peserta aksi kumpul di Jalan Bukit Tinggi, rute aksi Jalan Bukit Tinggi – Jalan Batu Sangkar – Jalan Imam Bonjol – Jalan Kartini – Jalan Raden Intan – Bunderan Gajah – dan Terus Menuju Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung. Koordinator Umum yaitu Agus F siregar sedangkan Koordinator Lapangan yaitu Hasan. Tema pokok yang diangkat pada demonstrasi kali ini yaitu penolakan PKL atas pembangunan Bambu Kuning Square (BKS) dan Bambu Kuning Trade Center (BTC).

Waktu yang ditunggu pun tiba, Senin 10 Mei 2010 lebih kurang 30 orang telah berkumpul di Jalan Bukit Tinggi dengan perlengkapan lengkap seperti poster dan spanduk yang bertuliskan **“TOLAK BKS DAN BTC”, “TOLAK DAN LAWAN PENERTIBAN SERTA PENGGUSURAN”, “BERIKAN LAPAK YANG LAYAK DAN REFRESENTATIF BAGI PKL”,** dan diantara poster tersebut ada sebuah poster yang bertuliskan **“BUBARKAN SATPOL PP”**.

Tepat pukul 08.30 WIB aksi pun dimulai. Peserta aksi yang kesemuanya PKL berbais dengan rapi mengikuti instruksi daripada koordinator lapangan (korlap). Aksi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu massa aksi yang dipimpin oleh korlap meneriakkan kata-kata pembakar semangat seperti **“HIDUP PKL HIDUP PKL HIDUP PKL”**.

Massa aksi yang dijaga oleh satu unit Dalmas dari Poltabes Bandar Lampung melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung. Rute aksi seperti yang telah diuraikan dalam rapat yaitu dimulai dari Jalan Bukit Tinggi – Jalan Batu Sangkar – Jalan Imam Bonjol – Jalan Raden Intan – Bunderan Gajah – Kantor Pemkot Bandar Lampung.

Kira-kira pukul 10.00 massa aksi tiba di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung. Di pintu gerbang Pemkot Bandar Lampung puluhan aparat Satuan Polisi Pamong Praja telah berjaga-jaga mengamankan kantor tersebut. Sempat terjadi aksi saling dorong antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL. Namun situasi mereda setelah perwakilan PKL dibolehkan masuk untuk bertemu dan

bernegosiasi dengan Walikota Edy Soetrisno. Namun sayang Aku yang menjadi salah satu bagian dari massa aksi tidak dapat ikut untuk melihat dan mendengar secara langsung negosiasi antara PKL dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hanya tiga orang yang masuk dua orang yang aku kenal yaitu Turaihan Aldi (46) dan Agus F Siregar (36) Ketua Pesatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Bandar Lampung.

Hampir satu jam massa aksi PKL menunggu hasil negosiasi antara PKL dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pukul 11.10 WIB Aldi dengan Agus keluar dari Kantor Pemkot Bandar Lampung. Setelah itu Agus memberikan penjelasan kepada PKL bahwa *pertama* Pemerintah Kota Bandar Lampung akan meninjau ulang kembali pembangunan Bambu Kuning Square (BKS) dan Bambu Kuning Trade Center (BTC), *kedua* Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pasar memberikan izin kepada PKL untuk membuka lapak dan berjualan asalkan menjaga ketertiban dan kerapihan. Setelah Agus mengumumkan hasil negosiasi, massa aksi membubarkan barisan dan kembali ke Pasar untuk melanjutkan aktivitasnya yaitu membuka *lapak* dan berjualan.

b. Kondisi PKL Sangat Memprihatinkan

Di mana-mana, krisis- baik ekonomi maupun politik - , cenderung melahirkan gejolak sosial (Santoso, 2004). Depresi ekonomi di Amerika Serikat tahun 1930 an melahirkan berbagai macam gelombang demonstrasi massa, krisis ekonomi di Tanzania pada tahun 1980 an melahirkan gelombang sabotase ekonomi atau yang kemudian sering disebut pasar gelap. Kegagalan restorasi ekonomi di Perancis

pada tahun 1940 an memunculkan penjarahan, dan krisis ekonomi serta politik di Indonesia pada tahun 1998 melahirkan berbagai bentuk penjarahan dan gejolak sosial termasuk di dalamnya aksi demonstrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu lapisan masyarakat kelas bawah yang terkena dampak krisis tersebut.

Persoalannya bukan apakah di sana ada atau tidak ada provokator, sudah barang tentu provokator pasti ada, akan tetapi sebagaimana yang dicatat Hobsbawn dalam studinya mengenai perbanditan sosial di lingkungan petani miskin Itali, bahwa gejolak semacam itu cenderung melahirkan keniscayaan dari suatu kondisi sosial yang buruk (Susanto, 2004). Bahkan Barington Moore (Susanto, 2004) menegaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan revolusi massa adalah datangnya kondisi buruk secara tiba-tiba, bersamaan dengan terganggunya rutinitas kehidupan, seperti kesulitan memperoleh lapangan pekerjaan. Jika hal ini terjadi maka revolusi massa pasti meletus.

Berbagai catatan di atas tidak dimaksudkan untuk menjadi dasar pertimbangan bahwa aksi demonstrasi pedagang kaki lima adalah salah satu bagian dari revolusi massa; catatan itu hanya sekedar mengantarkan kita pada suatu pemahaman bahwa gejolak sosial apapun namanya tidak semata-mata lahir dari kegiatan provokasi, akan tetapi dari suatu keadaan tertentu yang terkait dengan istitusi sosial di masa masyarakat itu berada.

Dalam hal ini, aksi demonstrasi tidak bisa dipisahkan dari keadaan buruk yang menimpa kehidupan ekonomi segenap lapisan masyarakat, akibat krisis yang terus berkepanjangan. Aksi demonstrasi adalah ungkapan atas segala persoalan, baik persoalan –persoalan lama yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap PKL yang kebijakan tersebut dianggap tidak berpihak dan merugikan PKL.

“Kondisi PKL sebenarnya memprihatinkan, bayangkan saja mereka berjualan selalu dalam bayang-bayang penggusuran. Kondisi sosial PKL ya lihat saja, PKL bagian dari masyarakat yang walaupun punya modal tapi modal itu kecil. Dari segi ekonomi, kehidupan PKL juga ga bagus-bagus amat, mereka punya keluarga yang harus diberi nafkah. Kalau terus digusur ya mereka mau makan dari mana. Dari segi politik, sampai saat ini kan belum ada satu peraturan pun yang berpihak kepada PKL, maka dari itu kawan-kawan PKL sendiri mengajukan perda tentang PKL tapi sampai saat ini belum selesai juga”. (Aldi, 41 tahun, 25 Juni 2010)

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional di awal tahun 2000 memang tengah mengalami sebuah gejolak. Runtuhnya rezim Soeharto yang melahirkan era reformasi justru semakin mempersulit kondisi kehidupan PKL. Dari tahun ke tahun jumlah PKL semakin meningkat, hal ini dikarenakan lapangan kerja yang tersedia semakin sedikit. Namun dari segi politik, PKL justru di dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan seperti yang terjadi pada pemilihan Walikota dan Calon Walikota Bandar Lampung periode 2010-2015.

Kondisi PKL dari segi ekonomi sebenarnya sangat memprihatinkan, PKL itu modalnya sedikit bahkan diantara PKL itu banyak yang mengutang untuk menutupi modalnya. Memang ada beberapa PKL yang mengalami kemajuan misalnya dari tainya hanya menyewa lapak pada saat ini sudah mampu menyewa toko. Tapi jika dilihat secara keseluruhan kondisi PKL sangat memprihatinkan. Dari segi sosial, masih banyak PKL yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jika ada untung dari hasil jualan maka hasil tersebut hanya mampu untuk membayar hutang dan belanja barang lagi. Untuk keluarga hanya pas-

pasan. Dari segi politik, pengalaman sekian kali pilkada PKL hanya disanjung jika hendak pemilu. Tentu hal ini dilakukan agar mampu menarik simpati dari PKL. Seperti pilkada 2010 calon tertentu sengaja menarik simpati PKL dengan cara datang ke pasar tradisional seperti Pasar Bambu Kuning. Namun setelah pemilu usai maka PKL dijadikan musuh. (Agus, 36 Tahun, 25 Juli 2010)

Menurut Aldi (46 tahun, pekerja sosial) Kondisi sosial, ekonomi dan politik PKL yang lemah serta tidak lemahnya respon dan kebijakan yang tidak tepat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung semakin membuat hidup PKL tidak menentu. Bayang-bayang penertiban dan penggusuran kerap menghantui PKL. PKL melakukan aksi-aksi perlawanannya di mulai pada tahun 2000. Perlawanan terbesar terjadi tahun 2007 ketika PKL yang berada di kawasan Pasar Bambu Kuning yang jumlahnya seribu lebih digusur oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mengerahkan alat-alat berat, dan puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menjamurnya PKL di tahun 2000 menyebabkan Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengambil langkah tegas yaitu mengeluarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, dan kenyamanan Kota yang dalam pelaksanaannya diterapkan kepada PKL. Penertiban dan penggusuran menjadi pilihan utama untuk mengatasi masalah PKL. Tetapi di penertiban dan penggusuran PKL dihadapi PKL dengan melakukan aksi demonstrasi serta melakukan *hearing* dengan DPRD Kota Bandar Lampung dan melakukan kunjungan kepada media cetak lokal seperti Lampung Post dan Radar Lampung.

PKL inikan menjamur sekitar tahun 2000, ya di tahun itu kami sudah melakukan perlawanan seperti aksi demonstrasi. Tetapi yang semenjak Edi Soetrisno menjabat sebagai Walikota di tahun 2005, kami PKL kerap dijadikan objek kebijakan yang justru merugikan

kami. Tercatat dalam hitungan saya, bahwa PKL melakukan aksi demonstrasi sebanyak 8 kali demonstrasi dan aksi terbesar yaitu pada tahun 2007 ketika PKL di bambu kuning yang berjumlah 1000 lebih lapaknya digusur. Di tahun 2007 tepatnya di bulan September sampai Desember PKL selalu diusik keberdaannya. Maka melihat itu kami PKL pun melakukan perlawanan seperti demonstrasi, hearing, roadshow ke media lokal dan lain-lain. (Agus, 36 Tahun 25 Juli 2010)

Aksi-aksi perlawanan yang di mulai PKL di tahun 2000 seperti melakukan demosntrasi, hearing dengan DPRD Kota Bandar Lampung, kunjungan ke media cetak lokal, negosiasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadikan PKL mampu bertahan walau dari kuantitas jumlah PKL semakin berkurang. Tetapi eksistensi PKL dari tahun 2000 sampai dengan saat ini masih bisa terlihat walau tempat atau *lapak* nya berpindah-pindah.

c. Alat Perjuangan yang Bernama Organisasi

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Kota Bandar Lampung menggabungkan diri ke dalam satu wadah organisasi yang bernama Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Bandar Lampung. PKL yang berada di kawasan Pasar Bambu Kuning pun ikut bergabung dalam organisasi PPKL. Menurut Hasan (31 tahun, pedagang kaki lima di Jalan Bukit Tinggi), organisasi PKL mempunyai peranan yang besar dalam mengatasi masalah penertiban dan penggusuran. Selain itu, organisasi juga berfungsi untuk sarana menampung aspirasi dan sarana saling membantu diantara PKL.

Menurut Eka (27 tahun, pedagang kaki lima di Jalan Imam Bonjol) menuturkan bahwa organisasi PKL yaitu PPKL sangat berguna karena jika ada penggusuran maka organisasi lah yang bergerak untuk melakukan demonstrasi.

Memang PKL selalu menjadi target operasi daripada Pemerintah Kota Bandar Lampung, stigma sebagai biang dan sumber penyebab kemacetan, *kesemerawutan*, dan ketidakindahan kota menempel kuat dalam diri PKL. Untuk melawan semua itu maka organisasi sangat dibutuhkan sebagai alat perjuangan untuk tetap dapat berdagang. Selain itu organisasi PKL juga dipergunakan sebagai alat untuk memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi.

“Organisasi PKL seperti PPKL sangat berperan dan berfungsi. Karena PKL selalu menjadi target Pemkot maka organisasi inilah alat perlawanannya. Selain itu, dengan adanya organisasi maka aspirasi PKL akan ditampung kemudian disampaikan kepada Pemkot. Organisasi PKL juga berfungsi untuk memobilisasi massa untuk aksi demonstrasi”. (Agus, 36 tahun, 25 Juli 2010)

Perlawanan yang sistematis dan terarah akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar ketimbang perlawanan yang tidak terorganisir dan tidak sistematis. Adanya organisasi seperti PPKL menjadikan posisi PKL sebagai kaum yang lemah secara ekonomi, sosial, dan politik menjadi diperhitungkan.

“Sebetulnya organisasi itu untuk satu perjuangan itu kan alat tuh, sebagai wadah untuk menampung semua aspirasi dan menyampaikan aspirasinya. Organisasi itu alat untuk melakukan perjuangan. Dan perannya juga sangat besar, berjuang tanpa organisasi susah”. (Aldi, 41 tahun, 25 Juni 2010)

C. Menilik Kembali Teori-teori

1. Perspektif Konflik Marxisme

Marxisme dalam pandangan Eagleton (2002) adalah sebuah teori ilmiah tentang masyarakat dan tindakan untuk mengubahnya; dan ini berarti tema-tema utama yang harus disampaikan Marxisme adalah kisah-kisah perjuangan umat manusia, laki-laki dan perempuan, untuk membebaskan dirinya dari bentuk-bentuk penindasan dan penghisapan. Eagleton (2002) dalam bukunya yang berjudul *Marxisme dan Kritik Sastra*, memberikan sebuah uraian mengenai benih-benih pemahaman revolusioner yang telah disemaikan oleh Marx dan Engels dalam bukunya yang sangat terkenal *The German Ideologi* (1845-46):

Produksi ide-ide, konsep-konsep, dan kesadaran pada dasarnya secara langsung terkait dengan kehidupan material manusia, bahasa kehidupan yang riil. Pemahaman, pemikiran, serta kehidupan spiritual manusia merupakan akibat langsung dari kehidupan material manusia...kita tidak bertolak dari apa yang manusia ucapkan, bayangkan, dan pahami atau dari manusia sebagaimana digambarkan, dipikirkan, dibayangkan, dipahami, untuk sampai pada manusia seutuhnya; melainkan kita bertolak dari manusia yang benar-benar aktif...

Bukan kesadaran yang menentukan kehidupan: kehidupan yang menentukan kesadaran. (Eagleton, 2002)

Pernyataan yang lebih lengkap tentang hal ini ditemukan dalam kata pengantar buku *A Contribution to the Critique of Political Economy* (1859):

Dalam produksi sosial kehidupan mereka, manusia menjalani hubungan-hubungan tertentu yang tak terelakan dan tidak tergantung pada kemauan mereka, *hubungan-hubungan produksi*, yang sesuai dengan tahap perkembangan alat-alat material mereka. Keseluruhan hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, suatu fondasi nyata, yang darinya muncul suatu superstruktur yang legal dan politis, dan membentuk

kesadaran sosial. Model produksi kehidupan material mengkondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan intelektual pada umumnya. Bukan kesadaran manusia yang menentukan kehidupan mereka, tetapi sebaliknya, kehidupan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka. (Eagleton, 2002)

Dengan kata lain, hubungan-hubungan sosial antar manusia terkait dengan cara mereka memproduksi dalam kehidupan material. “Kekuatan-kekuatan produktif” tertentu katakanlah organisasi pekerja di abad pertengahan, mencakup hubungan-hubungan sosial antara budak dan tuannya yang kita kenal sebagai feodalisme. Pada tahap selanjutnya, perkembangan model baru organisasi produksi didasarkan pada serangkaian hubungan sosial yang berubah. Kali ini antara kelas kapitalis yang menguasai alat-alat produksi, dengan kelas proletar yang tenaga kerjanya dibeli para kapitalis demi mendapatkan laba. Secara bersamaan, “kekuatan-kekuatan” dan “hubungan-hubungan” produksi ini membentuk apa yang disebut Marx sebagai struktur ekonomi masyarakat, atau yang secara umum oleh kalangan Marxis dianggap basis ekonomi atau infrastruktur. (Eagleton, 2002)

Dari basis ekonomi ini, setiap masa, muncul suatu superstruktur yaitu bentuk-bentuk hukum dan politik, bentuk negara, yang fungsi utamanya adalah melegitimasi kekuasaan kelas sosial yang memiliki alat-alat produksi ekonomi. Namun kandungan superstruktur lebih dari hanya unsur-unsur di atas: superstruktur juga terdiri dari bentuk-bentuk tertentu kesadaran sosial (yang bersifat politis, religius, estetis, etis, dan sebagainya), yang oleh kalangan Marxis dianggap sebagai ideologi. Sebagaimana superstruktur, ideologi juga berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan kelas yang berkuasa dalam masyarakat. Pada

akhirnya, pandangan-pandangan yang dominan dalam sebuah masyarakat adalah pandangan yang berasal dari kelas yang berkuasa. (Eagleton, 2002)

Di lain pihak, Scott (2000) memberikan sebuah penjelasan mengenai Marxisme dalam bukunya yang fenomenal *Senjatanya Orang-orang yang Kalah; Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*, dalam buku yang ditulisnya berdasarkan hasil penelitian di Sedaka sebuah Kampung yang berada di Malaysia, Scott menjelaskan bahwa telah menjadi mode dalam beberapa variasi neo-Marxisme yang lebih strukturalis untuk mengasumsikan bahwa kita dapat menyimpulkan watak dari hubungan antar kelas dalam setiap negara Dunia Ketiga yang bukan sosialis langsung dari beberapa ciri diagnostik seperti cara produksi yang dominan, cara dan saat masuk ke dalam dunia ekonomi, atau cara mendapatkan surplus. Prosedur ini mengakibatkan lompatan reduksionis yang cukup tinggi, langsung dari satu atau beberapa faktor ekonomi yang sedikit jumlahnya, kepada situasi kelas yang dianggap sebagai akibat dari faktor-faktor itu. Marxisme menempatkan pengalaman pelaku-pelaku manusia di pusat analisis adalah berkenaan dengan konsep kelas itu sendiri (Scott, 2000). Scott menguraikan bahwa kelas tidak membicarakan secara tuntas ruang penjelasan total mengenai aksi-aksi manusia.

Sementara itu menurut Magnis-Suseno guru besar filsafat sosial Sekolah Tinggi Driyarkara sekaligus penulis buku *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, memberikan sebuah penjelasan yaitu Marx beranggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial (Suseno, 2000). Keterasingan manusia adalah hasil penindasan satu kelas oleh

kelas lainnya. Untuk memahami struktur kekuasaan serta potensi perjuangan yang ada dalam masyarakat perlu diadakan analisis terhadap kelas-kelas sosial masyarakat. Masih menurut Marx, pelaku utama perubahan sosial bukanlah individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas sosial. Karena itu kita hanya dapat memahami sejarah dengan segala perkembangan yang terjadi apabila kita memperhatikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan bukan hanya kelas macam apa yang ditemukan, melainkan bagaimana struktur kekuasaan diantara mereka. Sehingga akan terlihat jelas bahwa dalam setiap masyarakat terdapat kelas-kelas yang berkuasa dan dikuasai.

Dari uraian di atas, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ketiga tokoh tersebut yaitu Eagleton, Scott, dan Magnis-Suseno tidak memberikan sebuah definisi yang jelas mengenai perspektif konflik marxisme itu sendiri. Eagleton hanya memberikan uraian-uraian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sebab akibat daripada hubungan-hubungan sosial serta hubungan-hubungan produksi yang akhirnya mengakibatkan terciptanya struktur ekonomi masyarakat atau basis ekonomi (infrastruktur) dan superstruktur yang justru menjadikan kelas berkuasa menjadi dominan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat. Di balik semua itu, Eagleton berhasil menjelaskan mengenai akibat dari adanya kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi yang membentuk basis ekonomi, yang darinya melahirkan superstruktur dan dari superstruktur melahirkan ideologi yang menjadi alat legitimasi dari kelas penguasa.

Berbeda dengan Eagleton, Scott menjadikan marxisme sebagai pisau analisis dari penelitiannya mengenai perlawanan sehari-hari kaum tani di Kampung Sedaka (sebuah kampung di Malaysia). Scott memahami marxisme sebagai sebuah dinamika hubungan daripada kelas berkuasa dan kelas yang dikuasai. Dengan kata lain, marxisme yang dipakai oleh Scott merupakan sebuah pendekatan untuk menganalisis sebuah fenomena social. Sementara Magnis-Suseno lebih melihat bahwa kelas-kelas sosial adalah pelaku utama dari perubahan sosial.

Penjelasan mengenai perspektif konflik marxisme yang dikemukakan oleh Eagleton, Scott, dan Magnis-Suseno sama-sama merujuk kepada sebuah pendekatan dalam menganalisis suatu permasalahan dengan menjadikan kelas-kelas sosial; yang di dalamnya terdapat manusia sebagai pelaku daripada kelas sosial tersebut, sebagai bahan analisis dari hadirnya permasalahan yang menimpa umat manusia seperti penindasan, penghisapan, ketimpangan dalam hubungan-hubungan produksi yang melahirkan struktur ekonomi masyarakat (basis ekonomi dan superstruktur ekonomi), serta hadirnya ideologi yang menjadi alat legitimasi kelas berkuasa. Perspektif konflik marxisme melihat manusia adalah subjek dari kelas-kelas sosial, dan kelas-kelas sosial adalah subjek daripada perubahan sosial. Itulah inti dari perspektif konflik marxisme.

Perspektif konflik marxisme yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu pendekatan serta cara pandang untuk memahami dan menganalisis aktivitas pedagang kaki lima sebagai salah satu subjek dari kelas sosial, serta subjek daripada perubahan sosial di Kota Bandar Lampung. Selain itu, perspektif konflik marxisme menjadi pisau analisis untuk memahami gerakan sosial pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning.

2. Hegemoni, Negosiasi, dan Kompromi

Hegemoni merupakan nama yang oleh Gramsci diberikan kepada proses dominasi ideologi (Scott, 2000). Gagasan sentral di baliknya adalah pernyataan bahwa kelas yang berkuasa mendominasi tidak hanya alat-alat produksi fisik, melainkan alat-alat produksi simbolis. Kendalinya atas kekuatan material produksi ditiru pada tingkat ide, dalam pengendalian 'sektor' ideologi masyarakat seperti kebudayaan, agama, pendidikan dan media. Dalam cara yang memungkinkannya menyebarkan nilai-nilai yang memperkuat posisinya. Pendek kata apa yang dilakukan Gramsci adalah menerangkan dasar institusional kesadaran palsu.

Pengertian hegemoni sendiri merujuk pada suatu keadaan di mana mereka yang sedang berkuasa, bisa dalam bentuk negara, kaum pemilik modal, ataupun kelas elit lainnya, berhasil memobilisasi persetujuan umum atas suatu nilai (sering kali disebut sebagai ideologi) yang dipromosikan sebagai ukuran kepatutan (Santoso, 2004). Hegemoni dengan demikian adalah penjelasan rasional dari apa yang sering disebut sebagai kesadaran semu atau mistifikasi; sebuah alasan mengapa kontradiksi materi di kalangan masyarakat kapitalis tidak mampu membangkitkan

perjuangan kelas. Dalam hegemoni, masyarakat dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, hingga pada akhirnya menganggap apa yang ada sebagai sebuah keniscayaan. Gagasan sentralnya adalah bagaimana kelas yang berkuasa mendominasi, tidak hanya alat produksi dalam konteks material, akan tetapi termasuk alat produksi simbolis. Melalui berbagai macam institusi seperti pendidikan, agama, kebudayaan, dan termasuk di dalamnya norma. Kelas yang berkuasa berusaha mengendalikan ideologi masyarakat semata-mata demi kepentingan kekuasaannya.

Adalah keniscayaan kalau kemudian hegemoni membuahkan kepasifan, kepatuhan, dan kompromi kalangan kelas rendahan kepada kelas-kelas berkuasa. Keadaan demikianlah yang sering dimaknai sebagai kesadaran semu, mistifikasi, dan ketidakniscayaan. Kalaupun pada suatu masa pernah terjadi perlawanan, menurut Gramsci, cenderung tidak sampai menyentuh wilayah ideologi. Perlawanan-perlawanan itu tidak tertuju pada akar persoalan yang sebenarnya alias tidak memiliki fokus yang tepat. Hegemoni adalah sebuah konstruksi sosial di tingkat ide, yang tentu saja membutuhkan anti tesis di tingkat ide pula. Dan inilah yang oleh para pengikut Gramsci sering dikatakan sebagai kendala utama bagi kalangan kelas rendahan.

Scott secara detail dan cermat sebenarnya sudah pernah mencoba memberi catatan terhadap premis tersebut. Melalui studinya mengenai aksi-aksi masyarakat di sebuah kampung di Malaysia yang disebutnya sebagai Sedaka. Dia menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam suasana yang sering disebut sebagai hegemoni itu. Di sana orang-orang miskin, para petani tidak berlahan,

yang dari luar nampak menggantungkan hidup dari belas kasihan para tuan tanah, baik melalui persewaan lahan untuk bercocok tanam, ataupun sekedar jasa pekerjaan pertanian, sama sekali tidak pernah menganggap itu semua sebagai sebuah jasa baik, ataupun keadilan yang bersifat alami, melainkan sebuah hak yang memang pantas diterima, atau malah kewajiban yang memang harus ditunaikan oleh orang kaya. Prinsip demikian memang tidak bisa diraih begitu saja dari permukaan, apalagi di atas pentas umum, di mana kelas-kelas yang berkuasa memiliki otoritas penuh atas semua hal, sejak hal-hal yang bersifat material maupun imaterial. Prinsip-prinsip seperti itu bisa kita dapatkan, jika dan hanya jika, terbuka suatu ruang ekspresi subkultur, seperti obrolan di warung kopi yang hanya melibatkan orang-orang sejawat, sesama kaum miskin yang senasib dan sepenanggungan.

Maka tidak heran kalau Scott mengungkapkan bahwa dalam beberapa hal, khususnya untuk konteks Sedaka, Gramsci harus berjungkir balik. Apa yang dari permukaan nampak sebagai hegemoni, kepatuhan, kompromi, ataupun kesadaran semu, serta ketidakberdayaan, di baliknya tersimpan suatu perlawanan ulet yang mencengangkan. Sinyalemen bahwa kalangan kelas rendahan cenderung tidak memiliki kemampuan melakukan perlawanan di tingkat ide, pada kenyataannya mereka justru paling pintar melakukannya. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat kelas rendahan secara diam-diam memberikan julukan minor pada kelas-kelas berkuasa; seperti mandor kikir, sinder rakus dan sebagainya. Dan yang paling mengagumkan adalah sebagaimana yang dilaporkan Scott di Sedaka, yakni orang-orang miskin, mereka-mereka yang tergolong sebagai kelas rendahan,

secara jeli dan halus berhasil memutarbalikan keadaan, memanfaatkan konteks normatif sebagai sarana untuk memaksakan berbagai kewajiban kepada kelas-kelas berkuasa, hingga secara keseluruhan menyerupai senjata makan tuan.

Uraian di atas hanyalah sebuah pengantar untuk kembali menganalisis dan mencemati pedagang kaki lima yang berada di kawasan lingkaran Pasar Bambu Kuning yang memang menjadi studi saya. Di kawasan lingkaran Pasar Bambu Kuning, sebagaimana yang telah secara panjang-lebar dibicarakan di muka, kita juga akan menemukan hal-hal yang disebut sebagai hegemoni. Katakanlah ide-ide normatif tentang larangan berjualan pada fasilitas publik seperti trotoar, bahu jalan atau pinggir jalan yang kemudian dimanifestasikan ke dalam sebuah aturan yang bernama peraturan daerah yang melarang seseorang untuk berjualan pada fasilitas publik, yang sudah barang tentu diproduksi oleh negara, kita anggap sebagai suatu nilai atau ideologi yang harus disepakati semua pihak. Dan pada kenyataannya memang disepakati.

Kalaupun di beberapa surat kabar pernah kita jumpai berita tentang demonstrasi yang meneriakan penghapusan peraturan daerah tentang larangan memakai fasilitas publik untuk kepentingan bisnis seperti yang dilakukan pedagang kaki lima hampir dipastikan keberadaannya tidak seratus persen mewakili ide masyarakat. Tetap berjualan pada trotoar, bahu jalan atau pinggir jalan, main 'kucing-kucingan' dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja barangkali lebih mewakili ide-ide perlawanan pedagang kaki lima. Dan justru di sanalah tersimpan hal-hal penting yang dalam konteks ini akan kita gunakan sebagai argumentasi,

bahwa apa yang dinamakan sebagai hegemoni cenderung memerlukan catatan kritis.

Penetrasi ideologi dalam bentuk nilai-nilai, seperti larangan berjualan pada fasilitas publik seperti trotoar dan pinggir jalan, adanya penertiban dan pengusuran, kendatipun sejauh ini berhasil memperoleh persepsi sebagai sesuatu yang bisa diterima di tingkat ide, faktanya cenderung dilanggar di tingkat praktis. Pedagang kaki lima sadar dan paham bahwa berjualan pada fasilitas publik seperti trotoar, bahu jalan atau pinggir jalan merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Kendatipun demikian pedagang kaki lima tetap melakukan aktivitasnya yaitu berjualan pada tempat-tempat yang seharusnya menjadi milik publik, tentu saja dengan seribu alasan.

“Ya itu kan namanya mencari nafkah untuk hidup, untuk makan, untuk nafkahin anak dan istri, mau digimanain lagi. Ya kalau mau nyewa toko ga mungkin kan butuh modal yang gede, makanya dagang-dagang dipinggir jalan itu”. (Hasan, 29 tahun, 10 Juli 2010)

“Ya wajar-wajar saja dagang di tempat-tempat itu, namanya juga mencari nafkah. Dan bagi saya itu tidak melanggar kecuali kalau di jalan”. (Eka, 27 tahun, 15 Juli 2010)

“PKL sadar kalo berjualan di trotoar dan pinggir jalan atau depan toko itu melanggar dan mereka tahu. Tapi kan mereka juga sebagai warga negara kan punya hak yang sama di dalam mencari penghidupan yang layak. (Aldi, 41 tahun, 25 Juni 2010)

Jika yang terjadi adalah pedagang kaki lima tetap berjualan dengan seribu alasan seperti alasan mencari nafkah atau sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mendapat penghidupan yang layak, maka dalam pandangan saya sudah tidak jelas lagi siapa yang melakukan hegemoni, dan siapa mengalami hegemoni; atau malah pengertian hegemoni itu sendiri sudah kabur. Membayangkan hegemoni sebagai suatu proses dominasi yang mutlak berlaku di manapun, rasanya bukan saja terlalu menyederhanakan persoalan, akan tetapi juga cenderung memposisikan masyarakat sebagai sebuah entitas yang tidak berkemampuan, atau malah meletakkan mereka sejajar dengan seekor keledai yang begitu saja menurut kemauan tuannya. Atau hal-hal yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut merupakan *counter* hegemoni atau hegemoni tandingan yang ditujukan kepada kelas berkuasa dan rasanya saya lebih sepakat kepada kata *counter* hegemoni atas tindakan pedagang kaki lima tersebut.

Adakalanya memang hegemoni bisa seratus persen berjalan sebagaimana yang dipikirkan Gramsci, yakni ketika sama sekali tidak berkembangnya subkultur, seperti keadaan yang terjadi di *camp-camp* konsentrasi Nazi dan rumah sakit jiwa, juga di penjara-penjara militer yang sangat ketat, di mana rutinitas keseharian benar-benar di bawah kendali pemegang kekuasaan, tak ada celah untuk membayangkan alternatif lain, bahkan di tingkat ide sekalipun, kecuali sekedar menyerahkan nasib pada apa yang ada, hari ini, esok, dan seterusnya. Di sini barangkali apa yang disebut hegemoni bisa menemukan bukti yang cukup kuat, bahwa penetrasi ide kelas-kelas yang berkuasa, dengan gemilang berhasil mematikan subkultur, menutup rapat semua celah, dan tidak menyisakan ruang sedikitpun bagi imajinasi-imajinasi.

Sesekali dimensi kultural, seperti konteks normatif atau kelayakan umum yang merupakan salah satu dari beberapa lembaga hegemoni memang berpengaruh; bahwa mereka-mereka yang setia mendukung ideologi penguasa menganggap berdagang di trotoar atau pinggir merupakan sesuatu yang jelas-jelas melanggar aturan karena menimbulkan kemacetan, kesemerawutan dan ketidaknyamanan sehingga pedagang kaki lima patut dan perlu ditertibkan. Dengan kata lain ada semacam sinyal-sinyal kendtipun lemah, bahwa dikalangan tertentu, suatu proses hegemoni tengah berlangsung; orang-orang, kendatipun jumlahnya sangat terbatas, dengan sukarela menyatakan persetujuan pada seperangkat nilai yang dipromosikan suprastruktur yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Persoalannya, apakah hanya dengan sinyal-sinyal yang lemah, kita bisa berkesimpulan bahwa penyelenggaraan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada pedagang kaki lima di kawasan lingkaran Pasar Bambu Kuning telah berhasil melakukan hegemoni pada segenap lapisan masyarakat? Tentu saja tidak. Ada dua alasan untuk ini, *pertama*, pengertian hegemoni sendiri mengacu pada sistem dominasi, sementara itu yang terjadi di sini justru sebaliknya; *kedua*, apa yang dinamakan sebagai konteks normatif itu pada umumnya hanya bekerja efektif di permukaan teratas arus-arus komunikasi masyarakat (pentas publik), di bagian yang lebih dalam (situasi ideal) kita akan segera menemukan konteks yang lain lagi. Dengan demikian, hegemoni secara teoritis diprediksikan akan membius dan melumpuhkan kesadaran, di tingkat praksis justru sebaliknya; ia menjadi semacam alat provokasi ampuh bagi

kalangan masyarakat kelas bawah seperti pedagang kaki lima untuk melakukan perlawanan terhadap kelas-kelas yang berkuasa.

Tetapi dalam pandangan saya, ada satu hal yang luput dipikirkan oleh Gramsci, yakni kemungkinan timbulnya kompromi politis dalam sebuah hegemoni. Jika ide dasar tentang hegemoni terpusat pada bentuk politisasi aspek normative oleh mereka yang berkuasa, pada kenyataannya oleh kelas-kelas yang dikuasai politisasi itu juga ditanggapi secara politis. Jika dalam hegemoni kelas-kelas yang berkuasa mempolitisir seperangkat nilai demi kepentingan kekuasaannya, maka dalam konteks yang sama, kalangan kelas rendahan menerima nilai yang telah dipolitisir itu secara politis. Ironisnya, jarang sekali kelas-kelas berkuasa mampu menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh mereka yang dikuasai itu adalah penerimaan politis. Seperti yang telah saya ungkapkan dalam “Catatan 10 Mei; Demonstrasi dan Negosiasi”, maka apa yang telah dilakukan oleh pedagang kaki lima khususnya negosiasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari kompromi politis. Hal inilah yang sebenarnya luput dari pandangan Gramsci. Dengan kata lain, hegemoni tidak selalu melahirkan sebuah resistensi tetapi akan memunculkan kemungkinan kompromi politis yang bias menguntungkan kelas berkuasa dan kelas dikuasai.

3. Kekuasaan

Paling sederhana, kekuasaan diartikan sebagai suatu hubungan sosial antara dua agen, yang pas dan berguna jika kita sebut (dalam istilah aslinya), “*principal*” dan “*subaltern*”. *Principal* adalah agen teratas dalam hubungan kekuasaan, sedangkan *subaltern* adalah agen yang berada di bawahnya. *Principal* memiliki dan menjalankan kekuasaan, sedangkan *subaltern* dipengaruhi oleh kekuasaan ini. Konkritnya, hubungan-hubungan semacam itu niscaya tidak terjadi satu pihak saja. *Principal* dalam suatu hubungan mungkin *subaltern* dalam hubungan yang lain, dan *subaltern* seringkali memiliki dan menjalankan kekuasaan terhadap *principal* yang bersangkutan dalam konteks tersebut. Jadi, dinamika hubungan kekuasaan pada mulanya difahami dalam konteks hubungan antara *principal* dan *subaltern* yang sederhana ini secara relatif (Fedyani, 2005. Tulisan tidak diterbitkan, makalah untuk bahan kuliah di Departemen Antropologi UI).

Menurut Marx, akan terlihat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat kelas-kelas yang berkuasa dan kelas-kelas yang dikuasai (Suseno, 2000). Kelas-kelas yang dimaksud oleh Marx adalah kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas adalah para pemilik alat-alat produksi, sedangkan kelas bawah adalah kaum buruh yang terpaksa menjual tenaga kerja mereka kepada kelas pemilik itu. Kelas atas merupakan kelas sosial yang menguasai bidang produksi, dan kelas bawah adalah mereka yang harus tunduk terhadap kekuasaan kelas atas. Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah merupakan hubungan kekuasaan: yang satu berkuasa atas yang lain. Di lain pihak, Gramsci seorang memberikan penjelasan mengenai kekuasaan melalui konsep hegemoni (Santoso, 2004). Gagasan sentralnya adalah

bagaimana kelas berkuasa mendominasi, tidak hanya alat produksi dalam konteks material, akan tetapi termasuk alat produksi simbolis. Melalui berbagai macam institusi seperti pendidikan, agama dan kebudayaan, termasuk di dalamnya norma, kelas yang berkuasa berusaha mengendalikan ideologi masyarakat, semata-mata demi kepentingan kekuasaannya.

a. Arus Utama dan Arus Kedua

Gagasan pokok mengenai kekuasaan dikembangkan dalam dua arah utama, yang membangun dua arus kajian mengenai kekuasaan (Ball 1975; Ball 1976; Clegg 1989). Tradisi utama terutama berkaitan dengan penggunaan kekuasaan secara episodik oleh seorang agen terhadap agen yang lain. Arus kedua dari penelitian tentang kekuasaan berfokus pada kapasitas disposisional untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan dalam hal ini adalah kemampuan yang dimiliki pelaku untuk memfasilitasi hal-hal tertentu yang terletak pada pusat perhatian. Pandangan arus utama terpusat pada apa yang dalam bahasa Perancis disebut "*pouvoir*", sedangkan arus kedua berkonsentrasi pada "*puissance*". Pandangan arus utama mengenai kekuasaan menggunakan kekuasaan berdaulat seperti negara. Arus pemikiran ini juga mengikuti pandangan Weber bahwa kekuasaan ada dalam organisasi-organisasi berdaulat lainnya, seperti bisnis dan gereja (Fedyani, 2005. Tulisan tidak diterbitkan, makalah untuk bahan kuliah di Departemen Antropologi UI).

Arus kedua dalam kajian kekuasaan tidak begitu kuat terikat pada arus utama, dan tidak memiliki landasan yang ekuivalen dengan pandangan Weber. Arus kedua ini merupakan sumber yang penting dari komentar kritis terhadap arus utama. Arus pandangan kedua mulai dari gagasan inti yang sama mengenai kekuasaan, tetapi kemudian berkembang dalam arah yang berbeda. Fokusnya bukan pada organisasi spesifik dari kekuasaan, melainkan pada strategi dan teknik kekuasaan. *“Pendekatan ini melihat kekuasaan tersebar di dalam masyarakat, bukan terbatas pada organisasi yang berdaulat saja”*. Menurut pendekatan ini, kekuasaan adalah milik kolektif dari sistem keseluruhan pelaku-pelaku yang bekerja bersama-sama, dari lapangan hubungan-hubungan sosial yang di dalamnya pelaku-pelaku tertentu berada. Pada saat yang sama, pendekatan ini menekankan aspek fasilitatif atau “produktif” dari kekuasaan, bukan aspek represif. Di antara ciri yang penting dari pendekatan ini adalah mekanisme komunal yang bersumber dari bentuk-bentuk budaya, ideologi, atau wacana yang melalui bentuk-bentuk ini konsensus dicapai.

Saya berpendapat bahwa kekuasaan selalu melibatkan resistensi, dan khususnya bentuk-bentuk penting dari resistensi itu muncul dalam dan di sekitar struktur dominasi. Bentuk-bentuk elementer perilaku kontra barangkali murni respon individual terhadap dominasi, misalnya, adanya keresahan, kebencian, atau penarikan diri, atau tindakan terisolasi pengrusakan atau sabotase. Aksi kontra yang sepenuhnya berkembang merupakan tindakan kolektif atau terkordinasi terhadap kepemimpinan tertentu.

Tindakan menentang itu terjadi apabila sumberdaya dan komitmen digerakkan untuk mencapai sasaran dan kepentingan bersama dan menggunakannya dalam perjuangan menentang kepemimpinan yang mapan (Tilly 1978:7 dalam Fedyani, 2005. Tulisan tidak diterbitkan, makalah untuk bahan kuliah di Departemen Antropologi UI). Aksi kontra itu memiliki kekuatan yang berasal dari sejumlah *subaltern* yang terlibat dan solidaritas yang mampu mereka capai dalam memobilisasi sumberdaya tersebut. Kekuatan menentang itu berasal dari kesadaran oposisi bersama atau perasaan tidak suka dan merupakan upaya kolektif untuk mempengaruhi pemegang atau pelaksana kekuasaan yang berdaulat. Dalam hal ini, kekuatan kontra dapat dilihat sebagai kekuasaan dari bawah, bukan kekuasaan dari atas.

Uraian-uraian teoritis di atas, akan mengantarkan kita kepada sebuah diskusi kekuasaan dalam konteks kasus pedagang kaki lima di kawasan lingkaran cincin Pasar Bambu Kuning dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku pemegang otoritas tertinggi di Kota Bandar Lampung. Mengacu kepada paragraf awal mengenai pembagian kekuasaan menjadi dua yaitu *principal* dan *subaltern*, maka kita dapat menempatkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan sebagai agen *principal* atau agen teratas sedangkan pedagang kaki lima merupakan *subaltern* yang kegiatan-kegiatannya seringkali dipengaruhi oleh aktivitas *principal*.

Sesuai dengan penjabaran Marx mengenai kekuasaan yaitu dalam dinamika masyarakat selalu ada yang namanya kelas atas dan kelas bawah. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai kelas atas yang tentu saja sebagai kelas berkuasa dan pedagang kaki lima merupakan kelas bawah atau kelas yang dikuasai oleh kelas berkuasa. Penjelasan kekuasaan dipaparkan pula oleh Gramsci mengenai penguasaan dominan atau dominasi kekuasaan oleh kelas berkuasa. Kelas berkuasa yang bukan saja menguasai alat-alat produksi tetapi menguasai pula alat produksi simbolis seperti pendidikan, agama dan kebudayaan, termasuk di dalamnya norma, kelas yang berkuasa berusaha mengendalikan ideologi masyarakat, semata-mata demi kepentingan kekuasaannya. Hegemoni yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung seperti telah dijelaskan dalam subbab Hegemoni, ternyata secara relatif gagal memperoleh dukungan dan pengakuan dari pedagang kaki lima. Penertiban dan penggusuran yang dimaknai sebagai bentuk kekuasaan ternyata mendapat perlawanan dari pedagang kaki lima. Perlawanan terbuka seperti bentrok fisik dan gaya resistensi seakan menjadi alat ampuh untuk melawan hegemoni Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima pun memiliki kekuasaan untuk melakukan perlawanan terhadap kelas berkuasa.

Adanya perlawanan dari pedagang kaki lima memiliki kesesuaian dengan pernyataan bahwa “...kekuasaan tersebar di dalam masyarakat, bukan terbatas pada organisasi yang berdaulat saja”. Kekuasaan dibagi menjadi arus utama dan arus kedua seperti yang dikemukakan oleh Ball (1975 dan 1976 dalam Fedyani, 2005. Tulisan tidak diterbitkan, makalah untuk bahan kuliah di Departemen

Antropologi UI). Pandangan arus utama mengenai kekuasaan menggunakan kekuasaan berdaulat seperti negara tentu saja dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan segenap institusi yang mampu melegitimasi segala tindakannya. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000 yang digunakan sebagai alat untuk melegitimasi penertiban dan pengusuran. Pedagang kaki lima dianggap melanggar peraturan karena menggunakan trotoar, bahu jalan atau pinggir jalan untuk berjualan maka dari itu pedagang kaki lima harus ditertibkan.

Jika penertiban dan pengusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebuah kuasa dari kelas berkuasa, maka aksi-aksi pedagang kaki lima dalam rangka perlawanan haruslah diakui bahwa pedagang kaki lima pun yang dalam analisis Marx dikategorikan sebagai kelas yang dikuasai dalam realitanya mempunyai kekuasaan untuk melawan. Uraian-uraian perlawanan yang telah dipaparkan dalam subbab sebelumnya adalah suatu bukti bahwa kekuasaan tersebar dalam masyarakat, dapat dimiliki oleh siapapun, baik yang dinamakan kelas berkuasa yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun kelas dikuasai yaitu pedagang kaki lima.

c. Preman

Bandit dan bandit sosial adalah dua hal yang berbeda. Menurut Hobsbawn (Santoso, 2004) bandit mengacu pada siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok orang yang menyerang dan merampok, mencuri dengan kekerasan serta pada mereka adalah orang-orang yang ter subordinasi oleh penguasa. Sedangkan hal paling pokok mengenai bandit sosial adalah bahwa mereka merupakan adalah orang-orang yang oleh pihak suprastruktur dianggap sebagai pelaku criminal,

akan tetapi oleh masyarakatnya dianggap sebagai pahlawan, pembela, penuntut balas, pejuang keadilan bahkan mungkin pemimpin pembebasan. Jika mencermati definisi bandit sosial maka kita akan mengingat kisah-kisah yang penuh mitos dan bukan sebuah fakta histori yang bias dilacak kebenarannya. Mitos-mitos seperti Ken Arok, Si Pitung dari Betawi, Brandal Loka Jaya yang kemudian menjadi Sunan Kalijaga, bahkan Robin Hood dari daratan Inggris. mitos mengenai tokoh yang oleh masyarakat rendahan atau miskin dianggap sebagai pembela kebenaran, pemberi keadilan, bahkan mereka mencuri dari orang kaya yang hasilnya diberikan kepada orang miskin. Namun, mereka itu oleh suprastruktur dianggap sebagai pembuat onar, pengganggu ketertiban, mereka adalah pelaku criminal yang harus diberi hukuman.

Uraian mengenai bandit dan bandit sosial sengaja saya paparkan sebagai pengantar diskusi mengenai bandit-bandit yang ada di Pasar Bambu Kuning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pasar Bambu Kuning ada orang-orang yang dapat disebut sebagai “bandit” mereka adalah yang sering disebut sebagai preman. Dalam kasus yang menimpa pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning, para preman merupakan bandit-bandit yang sebenarnya sama seperti pedagang kaki lima yaitu mereka pun ter subordinasi oleh *local government* atau Pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun yang menarik dari adanya preman ini karena mereka “preman atau bandit” mampu menguasai pedagang kaki lima. Penguasaan yang dilakukan oleh para preman ditunjukkan dengan meminta secara paksa uang keamanan kepada pedagang kaki lima. Kedok uang keamanan yang dipakai preman pada akhirnya tidak berarti apa khususnya sewaktu terjadinya penertiban

dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka para preman tidak mampu mencegah penertiban dan penggusuran. Jika ini terjadi rasanya sia-sia uang keamanan yang diberikan oleh pedagang kaki lima.

Keberadaan para preman memang menjadi fenomena tersendiri. Para preman selalu mengatasnamakan uang keamanan jika meminta uang kepada pedagang kaki lima yang ada di Pasar Bambu Kuning. Bagi mereka yang menolak permintaan preman maka para preman pun tidak segan-segan untuk melakukan aksi kekerasan (fisik maupun mental) seperti memukul, memarahi pedagang kaki lima, bahkan lebih buruk lagi pedagang kaki lima dan preman dapat terlibat perkelahian. Para preman tidak lain merupakan para bandit yang mengusik kehidupan para pedagang kaki lima. Kesimpulannya para preman bukanlah bandir sosial seperti Si Pitung maupun Robin Hood yang mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“kalau yang namanya pasar ya pasti ada preman. Biasa preman itu minta uang keamanan sama pkl. Kalo jumlahnya ya ada dua ribu, lima ribu atau sepuluh ribu. Kalo pkl jualannya laku ngasih tapi kalo belum laku ya dimintanya besoknya lagi. Tapi dalam seminggu itu pasti ngasih, kalo nggak ngasih bias rebut”. (Hasan, 29 tahun, 7 Oktober 2010)

“kadang ada pedagang kaki lima yang rebut sama pkl, tapi karena kita jualannya mau aman ya terpaksa ngasih uang sama preman biar nggak diganggu”. (Eka, 27 tahun 7 Oktober 2010)

Diskusi mengenai preman sebagai bandit sang pengusik kehidupan pedagang kaki lima lebih menarik jika dianalisis secara lebih mendalam khususnya mengenai konsep *power and powerless* seperti yang telah saya gambarkan dalam skema teoritis. Menarik karena di Pasar Bambu Kuning bukan hanya ada pedagang kaki lima yang melakukan resistensi dan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang melakukan hegemoni. Tetapi peneliti menemukan orang-orang “preman” yang tidak masuk diantara kedua pihak tersebut. Mereka adalah kelas “abu-abu” yang di satu sisi mampu menguasai pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning, dan di sisi lain mereka pun dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka adalah orang-orang yang di satu sisi mempunyai *power* untuk memaksa pedagang kaki lima mengeluarkan uang keamanan dan di satu sisi mereka pun *powerless* terhadap kebijakan Pemerinta Kota Bandar Lampung yang menyangkut penertiban dan penggusuran.

4. Kosa Kata Perlawanan: Mempertimbangkan Konteks

Kalau kita mengacu pada kamus, kata melawan (*to resist*), memiliki pengertian yaitu mengusahakan sekuat tenaga untuk menahan, atau membalas kekuatan, atau efek dari (Scott, 2000)...Tapi kalau mengacu pada teks-teks studi perlawanan yang ada, kita akan segera berhadapan dengan gambaran yang lain, bahwa konsepsi melawan atau perlawanan tidak sesederhana dan sekering definisi yang ada di kamus. Setidaknya Mullin dan Genovase (Santoso, 2004) meyakini bahwa sebuah perlawanan sosial, harus bersifat organik, sistemik, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, dan mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi. Resistensi adalah tindakan yang ditujukan untuk melawan dan menguasai hubungan kekuasaan yang tidak selara, sebagai hal yang berbeda dari konsep otonomi relatif, yaitu pihak yang tidak berdaya biasanya menyingkir atau menghindar dari realitas penindasan (Saifuddin, 2005).

Berangkat dari definisi di atas, kita memerlukan banyak penjelasan untuk sampai pada kesimpulan bahwa aksi kecil-kecilan itu, yang dari permukaan hanya nampak sebagai ekspresi kemarahan biasa, bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan. Dan dalam hal ini, mau tidak mau, kita akan banyak mengutip Scott, pengamatannya yang jeli terhadap perilaku petani di Sedaka, kampung penelitiannya di Malaysia, mengantarkan kita pada suatu pemahaman bahwa pemaknaan perlawanan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks sosialnya. Kita tidak akan pernah menjumpai perlawanan pedagang kaki lima yang ada di kawasan lingkaran cincin Pasar Bambu Kuning, kecuali hanya sedikit, kalau

gambaran yang ada di kepala kita mengacu pada bentuk-bentuk demonstrasi atau aksi massa lainnya.

Karya Scott sebenarnya telah memberikan semacam fondasi yang cukup kokoh bagi perspektif baru perlawanan, khususnya gaya-gaya perlawanan seperti yang dilakukan oleh kaum tani di Sedaka. Untuk konteks pedagang kaki lima di kawasan lingkaran cincin Pasar Bambu Kuning, perlawanan di luar aksi massa atau demonstrasi ditunjukkan dengan tetap berjualan di trotoar dan pinggir, berpindah-pindah lokasi jualan, serta tidak berjualan pada saat ada penertiban dan penggusuran merupakan gaya perlawanan pedagang kaki lima dalam menghadapi dominasi kelas berkuasa yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam pandangan saya, apa yang dilakukan oleh pedagang kaki lima mempunyai makna tersirat yaitu strategi perlawanan pedagang kaki lima tidak sebatas pada aksi demonstrasi. Perlawanan terbuka memang ada namun hal itu terjadi dalam waktu-waktu tertentu seperti saat ada penertiban dan penggusuran pedagang kaki lima harus beradu fisik dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, demonstrasi menolak pembangunan Bambu Kuning Square (BKS) dan Bambu Kuning Trade Center (BTC), hearing dengan anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan kunjungan ke media cetak lokal. Aksi-aksi tersebut hanya pada waktu-waktu tertentu yang sifatnya tentatif.

Namun, yang menjadi catatan tentu saja aktivitas pedagang kaki lima yang sehari-hari tetap dengan menggunakan fasilitas publik semisal trotoar dan pinggir jalan. Memang jarang yang menangkap makna daripada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar padahal jika diuraikan lebih dalam maka strategi perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima selaku kaum yang dikuasai ternyata mampu memainkan peran yang cukup baik sehingga mereka tetap bisa berjualan walau ancaman penertiban dan penggusuran berada dalam benak mereka. Lebih jauh lagi, seperti yang diungkapkan oleh Eka bahwa ketika ada penertiban dan penggusuran pedagang kaki lima yang mengetahui akan hal itu memilih untuk tidak berjualan, dan berjualan lagi tiga hari kemudian. Bukankah hal semacam ini menjadi pertanda bahwa pedagang kaki lima memiliki cara perlawanan tersendiri agar mereka tetap bisa bertahan.

“Bagi PKL yang ngikutin surat pemberitahuan itu ya mereka waktu hari ada penertiban ya ga jualan. Jualan lagi satu tiga hari kemudian. Daripada digusur lebih baik ga jualan”. (Eka, 27 tahun, 06 September 2010)

Inilah resistensi, jika boleh dikatakan perlawanan pedagang kaki lima di kawasan lingkaran Pasar Bambu Kuning bersifat laten dan berlangsung setiap hari dan setiap kali akan ada penertiban dan penggusuran.

5. Negara

Pembicaraan mengenai negara serta relevansinya dengan studi gerakan sosial pedagang kaki lima yang saya lakukan akan banyak mengacu kepada penjelasan-penjelasan Louis Althusser yang menurut pandangan saya, Althusser mampu menjelaskan Negara sebagai apparatus Negara dan Negara sebagai apparatus ideologis negara. Pandangan Althusser mengenai negara lebih banyak bersinggungan dengan kekuasaan yang seharusnya saya sampaikan dalam subbab kekuasaan, namun saya memilih menempatkan pandangan Althusser dalam subbab tersendiri yaitu subbab Negara. Menurut Marx negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dalam tangan kelas-kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka (Suseno, 2000). Jadi negara pertama-tama tidak bertindak demi keuntungan umum, melainkan demi kepentingan kelas-kelas atas. Negara bertujuan untuk mempertahankan syarat-syarat kehidupan dan kekuasaan kelas berkuasa terhadap kelas yang dikuasai.

Definisi negara sebagai sebuah negara kelas, yang termanifestasi dalam apparatus negara, menghadirkan sebuah fakta yang teramati di dalam berbagai ragam represi yang berlangsung dalam wilayah pengamatan tersebut: mulai dari pembantaian Juni 1848 dan pembantaian Komun Paris, Pembantaian Mei 1905 di Petrograd, atau fakta yang dapat kita amati di Indonesia ialah adanya penculikan terhadap para aktivis di selama era orde baru yang menentang keras dominasi militer, bahkan sampai dengan era reformasi berjalan represifitas Negara terus

terjadi seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Hal-hal tersebut seakan menjelaskan telah ada dominasi kekuasaan yang dilakukan atas nama demokrasi politik.

Negara secara eksplisit dipandang sebagai sebuah aparatus represif (Althusser, 2007). negara pada intinya merupakan apa yang disebut oleh para penganut Marxis klasik sebagai *aparatus Negara*. Istilah ini memiliki arti: bukan hanya aparatus yang memiliki bidang kerja yang spesialis, seperti polisi, pengadilan, penjara; namun juga tentara yang mengintervensi secara langsung karena posisinya sebagai kekuatan represif suplementer yang paling menentukan ketika polisi dan korps-korps bantuan yang spesialis ‘tak mampu menguasai keadaan’. Di atas semua itu, juga ada kepala Negara, pemerintah, dan birokrasi.

Lebih jauh Althusser memberikan satu poin penting bahwa Negara (dan eksistensinya dalam aparatusnya) tak memiliki makna kecuali sebagai sebuah fungsi dari kekuasaan Negara. Segenap perjuangan kelas politik berkisar di seputar Negara ini akan berada dalam tema kepemilikan kekuasaan Negara atau pengambilalihan dan pelanggengang kekuasaan Negara oleh kelas tertentu atau oleh sebuah aliansi antarkelas atau antarfraksi kelas. Para penganut Marxis klasik dalam pandangan Althusser selalu mengklain bahwa Negara adalah aparatus represif negara, kekuasaan Negara dan apparatus Negara harus dibedakan, tujuan perjuangan kelas berkaitan dengan kekuasaan Negara, dan sebagai konsekuensinya dengan penggunaan apparatus Negara oleh kelas-kelas yang memegang kekuasaan Negara sebagai sebuah fungsi dari tujuan –tujuan kelas mereka, dan

kaum proletariat harus mengambil alih kekuasaan Negara untuk bias menghancurkan apparatus Negara borjuis yang ada. Namun pandangan tersebut mendapat kritik oleh Althusser karena para penganut Marxis klasik tidak berhasil mensistematisir dalam bentuk teoritis kemajuan-kemajuan menentukan sebagaimana yang diimplikasikan oleh pengalaman-pengalaman dan prosedur-prosedur mereka. Pengalaman dan prosedur mereka sangat terbatas terutama hanya pada dataran praktek politik saja.

Dalam kenyataannya, yaitu dalam praktek politik mereka, para penganut Marxis klasik memperlakukan Negara sebagai sebuah realitas yang lebih kompleks ketimbang Negara seperti yang didefinisikan dalam teori Marxis tentang Negara. Ketika membahas teori Negara, maka harus dipertimbangkan perbedaan antara kekuasaan Negara dan apparatus Negara, namun juga realitas yang meski memang berada di pihak yang sama dengan apparatus Negara (yang represif), namun tidak boleh dikacaukan dengan kedua hal tersebut. Karena alasan inilah, Althusser menyebut realitas itu dengan konsep: *aparatus ideologis Negara*.

Kata ideologi ditemukan oleh Cabanis, Destutt de Tracy yang menggunakan kata itu terhadap sebuah obyek dari teori (genetik) mengenai ide-ide. Kemudian Karl Marx mengambil alih istilah tersebut dan memberikan defines bahwa ideology ialah system ide-ide dan gambaran-gambaran yang mendominasi pikiran seseorang atau sebuah kelompok social (Althusser, 2007)

Apakah aparatus ideologis Negara itu? Aparatus ideologis tersebut tidak boleh disamakan dengan aparatus (represif) Negara. Dalam teori Marxis, Aparatus Negara terdiri atas: pemerintahan, birokrasi, tentara, polisi, peradilan, penjara dan sebagainya, yang secara keseluruhan membentuk apa yang nantinya Althusser sebut sebagai aparat represif Negara. Represif di sini menyatakan bahwa apparatus Negara yang tengah diperbincangkan 'menjalankan fungsinya dengan kekerasan' paling tidak pada akhirnya menggunakan kekerasan (karena ada represi, sebagai misal represi administrative, yang mengambil bentuk-bentuk non fisik).

Althusser (2007) menyebutkan beberapa institusi yang disebut sebagai Aparatus Ideologis Negara diantaranya:

1. Aparatus Ideologis Negara Keagamaan (sistem Gereja yang bermacam-macam),
2. Aparatus Ideologis Negara Pendidikan (sistem 'Persekolahan' negeri dan swasta yang bermacam-macam),
3. Aparatus Ideologis Negara Keluarga (Keluarga turut terlibat dalam proses reproduksi kekuasaan tenaga kerja),
4. Aparatus Ideologis Negara Hukum,
5. Aparatus Ideologis Negara Politik (sistem politik, termasuk partai-partai politik yang berkuasa),
6. Aparatus Ideologi Negara serikat buruh,
7. Aparatus Ideologis Negara komunikasi (pers, radio dan televisi, dan sebagainya), dan

8. Aparatus Ideologi Negara Kebudayaan (Kesusatraan, seni, olahraga dan sebagainya)

Kesemua hal tersebut tentu saja dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaannya. Dasar pembedaan Aparatus Ideologi Negara dengan Aparatus (represif) Negara terletak pada fungsinya yaitu jika Aparatus (Represif) Negara menjalankan fungsinya dengan 'Kekerasan', maka Aparatus Ideologi Negara menjalankan fungsinya dengan 'Ideologi' yang menguntungkan kelas berkuasa. Di sisi lain, Aparatus (Represif) Negara membentuk sebuah totalitas terorganisir di mana bagian-bagian yang berbeda tersentralisir di bawah suatu kesatuan kekuasaan kelas berkuasa yang memegang kekuasaan Negara, sementara Aparatus Ideologi Negara bersifat beragam, berbeda-beda, 'relatif otonom' dan Aparatus Ideologis Negara akan dilanggengkan oleh ideologi berkuasa, yang tak lain ialah ideology kelas berkuasa.

Aparatus (Represif) Negara dalam menjalankan tugasnya yaitu mengamankan kekuasaan kelas berkuasa dengan jalan kekerasan atau represif, maka Aparatus Ideologi Negara akan menjalankan perannya masing-masing. Misalnya aparatus politik menjalankan perannya dengan jalan menundukan individu-individu pada ideology politik Negara, yaitu ideologi 'demokratis' baik parlementer maupun presidensial. Aparatus komunikasi lewat jalan mencekoki setiap warga Negara dengan informasi misalnya seputar nasionalisme, liberalisme, sarana-sarana pers, radio dan televise serta Apparatus keagamaan dengan jalan khotbah-khotbah agar menghormati para pemimpin. Aparatus pendidikan akan mengamini segala

kebijakan dalam dunia pendidikan yang menguntungkan kelas berkuasa seperti biaya pendidikan yang mahal dengan kata lain hanya orang-orang yang mempunyai uang yang dapat merasakan apa itu sekolah.

Penjelasan Althusser seakan memberi sebuah deskripsi mengenai fungsi dan peran daripada negara itu sendiri. Memang dalam beberapa hal, negara menjalankan tugas untuk pembangunan dengan tujuan mensejahterakan rakyat seperti membangun sarana transportasi, pembangunan pasar atas dasar Instruksi Presiden (Inpres) yang pernah dilakukan di era orde baru, dan lain sebagainya. Tetapi kesemua itu dilakukan tidak lain hanyalah untuk melanggengkan dan mempertahankan kekuasaan kelas berkuasa.

Kita menemukan bentuk-bentuk represifitas negara dalam kasus pedagang kaki lima yaitu represifitas kebijakan yang mengatasnamakan pembangunan Bambu Kuning Square (BKS) dan Bambu Kuning Trade Center (BTC). Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan berada dalam ancaman penertiban dan penggusuran, jika hal itu terjadi maka tidak jarang pedagang kaki lima harus beradu fisik atau bentrok dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja walaupun pada akhirnya pedagang kaki lima tetap kalah.

“kalo PKL yang nekat jualan bisa berantem sama satpol pp karena dagangan PKL pasti diangkut. Kalo udah diangkut kalo mau ngambil itu barang dagangan ya harus ke kantor satpol pp. Kalo barang dagangan masih ada syukur kalo aga ada ya mau gimana lagi” (Hasan, 29 Tahun, 06 September 2010)

Kasus pembangunan BKS yang seharusnya melibatkan pedagang kaki lima (jika memang benar BKS itu disediakan untuk pedagang kaki lima) dalam kenyataannya tidak dilibatkan sama sekali. Pembangunan BKS justru diserahkan kepada pihak pengembang yang tentu saja akan membuat BKS itu menjadi sebuah bangunan yang dikomersilkan dan jelas hal ini merugikan pedagang kaki lima yang modalnya terbatas. Jika ini terjadi, kita mesti bertanya di manakah keberpihakan Negara kepada kelas atau kaum yang secara ekonomi lemah? Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku pemegang otoritas tertinggi pemerintah di Kota Bandar Lampung justru mengesampingkan suara-suara dan jeritan-jeritan pedagang kaki lima yang membutuhkan tempat yang layak. Jika ini etsu terjadi maka tesis Marx mengenai keberpihakan Negara kepada kelas berkuasa patut kita iyakan. *“Jadi negara pertama-tama tidak bertindak demi keuntungan umum, melainkan demi kepentingan kelas-kelas atas. Negara bertujuan untuk mempertahankan syarat-syarat kehidupan dan kekuasaan kelas berkuasa terhadap kelas yang dikuasai”*. (Suseno, 2000)

“PKL dari awal dibangunnya Bambu Kuning Square (BKS) menolak keberadaan BKS. PKL menolak karena BKS bukan diperuntukan untuk PKL. Di situ ada lantai satu, dua dan tiga. Lantai satu dan dua itu diperuntukan untuk kios yang harganya mencapai 200 juta rupiah dengan ukuran 3x3 m. Kalau kita berbicara BKS sama saja kita akan mengulangi hal yang sama yang pernah terjadi di Pasar Bambu Kuning di mana pedagang yang Bambu Kuning yang berada di lantai dua itu mengalami penurunan omset yang drastis bahkan ada yang gulung tikar. Saya kira semua ini sangat bertentangan dengan yang selama ini diinginkan PKL. Kita harus melihat dengan jelas bahwa PKL itu modalnya terbatas, modalnya hanya berada dikisaran 5 juta ke bawah. Kalau PKL dipindahkan ke BKS maka yang terjadi yaitu PKL akan semakin terpuruk kehidupan ekonominya. Jika PKL disuruh beli toko maka tidak akan mampu jika harganya tinggi seperti itu”. (Agus, 36 tahun, 25 Juli 2010)

Pandangan Althusser mengenai Aparatus Ideologi Negara banyak dipengaruhi oleh Gramsci yang terlebih dulu mengemukakan konsep hegemoni atau dominasi ideologi dari kelas berkuasa. Seperti yang telah saya jelaskan dalam sub bab Hegemoni, bahwa gagasan sentral adalah pernyataan bahwa kelas yang berkuasa mendominasi tidak hanya alat-alat produksi fisik, melainkan alat-alat produksi simbolis. Dalam hal Aparatus Ideologis Negara, Penguasaan Negara dalam seperti dalam bidang pers mampu menggiring opini publik untuk tunduk dan mengiyakan beragam kebijakan yang merugikan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Pasar Bambu Kuning atau pedagang kaki lima di daerah lain. Pemberitaan mengenai penertiban dan penggusuran yang terkadang menyudutkan pedagang kaki lima seperti karena berjualan ditempat yang ‘tidak semestinya’ maka pedagang kaki lima ditertibkan. Kata-kata ditempat yang ‘tidak semestinya’ menyudutkan dan menyalahkan pedagang kaki lima.

“APPSI akan Bangun Bambu Kuning Square; Pemkot Bandar Lampung akan membentuk tim penataan pedagang kaki lima (PKL). Hal itu terkait rencana Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) membangun Pasar Wisata Bambu Kuning Square di lahan milik PT Kereta Api (KA), Jalan Kotaraja. (Lampung Post, Kamis, 8 Mei 2008)

Pandangan-pandangan saya mengenai Negara yang banyak mengacu kepada Althusser memang memberikan sebuah deskripsi yang negatif tentang Negara. Namun fakta telah berbicara kepada kita semua penertiban, penggusuran, pembangunan yang mengatasnamakan rakyat, dan kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Negara khususnya Indonesia beserta para aparatus pusat dan daerah hanya menguntungkan suatu golongan tertentu tentu saja kelas berkuasa yang di dalamnya berisi pengusaha serta tokoh-tokoh partai politik yang berkuasa.

6. Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima

Dalam sub bab gerakan sosial di Bab II, Sztompka (2005) menyebutkan bahwa definisi gerakan sosial harus terdiri dari empat komponen, yaitu:

1. Kolektivitas orang yang bertindak bersama.
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama.
3. Kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal.
4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional.

Sehingga Sztompka (2005) memberikan definisi bahwa gerakan social adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka. Sementara itu Mirsel (2004) memberikan definisi bahwa gerakan social adalah tindakan yang tak terlembaga (*noninstitutionalised*) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat.

Menurut Scott (2000), gerakan sosial merupakan tindakan-tindakan atau bentuk perlawanan dapat dikelompokkan kepada dua bagian umum, yakni, *pertama*, perlawanan sehari-hari yang bersifat informal, sering tidak terbuka dan pada umumnya berkenaan dengan hasil langsung bersifat defacto. *Kedua*, perlawanan sungguh-sungguh yang bersifat formal, terorganisir, sistematis, berprinsip atau

tanpa pamrih, mempunyai akibat revolusioner dan atau mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri.

Jika dicermati, definisi gerakan sosial yang diberikan oleh Sztompka dan Mirsel mempunyai persamaan yang terletak pada analisisnya bahwa gerakan social adalah tindakan yang tidak terlembaga yang dilakukan secara kolektif ataupun kelompok dengan tujuan melakukan perubahan. Dalam konteks penelitian ini, setidaknya ada catatan kritis untuk definisi yang diberikan oleh kedua ahli tersebut khususnya mengenai tindakan yang tidak terlembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beragam tindakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terlembaga secara formal.

Adanya aksi terbuka semisal demonstrasi, *hearing* dengan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, kunjungan ke media cetak lokal Lampung merupakan suatu bukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima merupakan tindakan yang terlembaga. Tidaklah mungkin aksi demonstrasi maupun kunjungan ke media cetak dilakukan secara spontan, kesemuanya itu membutuhkan rencana serta strategi-strategi agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai ataupun untuk pedagang kaki lima tujuan mereka secara sederhana dapat tetap berjualan tanpa ada sedikitpun ancaman penertiban dan pengusuran.

Jika kita mengacu kepada uraian Scott, maka kita akan menemukan sebuah persamaan atas apa yang dilakukan pedagang kaki lima yaitu perlawanan sehari-hari yang bersifat informal dan tidak terbuka serta perlawanan pedagang kaki lima yang bersifat formal, terorganisir serta sistematis. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima untuk tetap bisa berjualan dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak terlembaga. Seperti yang telah diuraikan dalam subbab ***Strategi Perlawanan Pedagang Kaki Lima***, kita dapat melihat beragam tindakan pedagang kaki lima yang tidak terlembaga seperti berdagang dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari penertiban dan penggusuran, berjualan kembali setelah dilakukan penertiban dan penggusuran, maupun tindakan yang spontanitasnya tinggi seperti terjadinya bentrok fisik antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat terjadi penertiban dan penggusuran.

Dari uraian di atas tersebut, maka gerakan sosial pedagang kaki lima merupakan tindakan-tindakan atau bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima secara terbuka; formal, sistematis dan terorganisir, serta secara tidak terbuka atau *laten*; perlawanan sehari-hari yang bersifat informal, sering tidak terbuka dan pada umumnya berkenaan dengan hasil yang dapat dirasakan secara langsung yang dalam penelitian ini disebut sebagai *resistensi*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning, yaitu:

1. Keberadaan pedagang kaki lima selalu diusik oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terutama setelah adanya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamana, Kebersihan, Kesehatan dan

Keapikan Dalam Wilayah Kota Bnadar Lampung. Perda No 8 Tahun 2000 menjadi senjata ampuh bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban dan kebijakan terhadap pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung khususnya di kawasan Pasar Bambu Kuning. Bagi pedagang kaki lima Perda No 8 Tahun 2000 sangat merugikan maka itu, pedagang kaki lima melakukan perlawanan secara terbuka meminta agar perda tersebut ditinjau ulang.

2. Adanya kebijakan penertiban dan penggusuran yang jelas-jelas merugikan pedagang kaki lima membuat pedagang kaki lima harus bertindak baik secara terbuka dan tidak terbuka atau *laten* untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan penertiban dan penggusuran.
3. Pembangunan Bambu Kuning Square (BKS) dan Bambu Kuning Trade Center (BTC) yang bagi pedagang kaki lima pembangunan kedua tempat tersebut tidak menandakan keberpihakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning yang mempunyai modal yang terbatas.
4. Permintaan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga pedagang kaki lima merasa perlu untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat membantu mereka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Faktor-faktor tersebut memaksa pedagang kaki lima melakukan perlawanan terhadap kelas yang berkuasa yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung. Strategi perlawanan pedagang kaki lima walaupun sebagai kelas dikuasai, namun mempunyai khas tersendiri khususnya perlawanan yang bersifat *laten*. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima mampu membuat mereka tetap bertahan sampai dengan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan memang tersebar di dalam masyarakat dan tidak hanya dimiliki oleh kelas berkuasa.